



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Delaihari 70814
Telp. (0512) 21863 no. Faximile (0512) 21009

2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai perwujudan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pelaihari, Februari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan Eujud Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini ketiga RPJMD 2018-2023. Selain Media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, laporan kinerja juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus menggambarkan keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 (satu) sasaran yang diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja utama dan 4 sasaran strategis yang ukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 22 (sebelas) indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis diatas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dapat dikatakan **Sangat Baik**. Hal ini berdasarkan pada hasil pengukuran target pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan Tahun 2021 terhadap realisasi pencapaian target Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 1 (satu) sasaran 1 (satu) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian kinerja **sangat memuaskan**. Indikator kinerja Program yang terdiri dari 4 Sasaran dan 11 indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 126,16 % dengan rincian 1 indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori kurang dan 10 indikator kinerja dengan katagori **Sangat memuaskan dan katagori memuaskan**.

Pencapaian Kinerja pada tahun 2021 belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun sangat diharapkan kedepannya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 sangat diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Februari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT



LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	17
D. Produk dan Layanan	19
E. Sistematika Penyajian	19
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Visi RPJMD	21
B. Misi RPJMD	21
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	22
D. Indikator Kinerja Utama	24
E. Perjanjian Kinerja	25
F. Program dan Kegiatan	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	31
1. Sasaran RPJMD	31
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut	35
3. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	44
1. Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian	51
2. Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	60
3. Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi	64
4. Kepala Bagian Keuangan	69
1. Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	74
2. Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi	77
3. Kasubbag Akutansi dan Pelaporan	80

5.	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	85
1.	Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan	89
2.	Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	95
3.	Kasubbag Fasilitasi Persidangan dan Risalah	105
B.	Akuntabilitas Keuangan	114
1.	Anggaran dan Realisasi APBD 2021	114
2.	Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	121
3.	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	122
BAB IV.	PENUTUP	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Strategi Peningkatan Kinerja	127
	LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	17
2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023	23
3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	25
4 Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	26
5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	29
6 Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023	31
7 Indikator Kinerja utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut	36
8 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	36
9 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	37
10 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018 - 2021	38
11 Jumlah Nilai Per Unsur, Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur, Dan Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per Unsur Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun 2021.....	39
12 Realisasi Program Penunjang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	42
13 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	45
14 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021	47
15 Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	50
16 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	52
17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	54

18	Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	55
19	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2021	56
20	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2021.....	57
21	Realisasi Kegiatan/sub kegiatan Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	60
22	Realisasi Capaian Indikator Kinerja kasubbag Rumah tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	61
23	Realisasi Capaian Indikator Kinerja kasubbag Rumah tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	62
24	Realisasi Kegiatan/sub kegiatan Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	64
25	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	65
26	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	67
27	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	68
28	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	69
29	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	70
30	Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2021.....	71
31	Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	73
32	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	74
33	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	75
34	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	77
35	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	78

36	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	79
37	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	80
38	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	81
39	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	82
40	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Kasubbag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	84
41	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	85
42	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019-2021	86
43	Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	88
44	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	90
45	Realisasi capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	91
46	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	94
47	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	96
48	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021.....	98
49	Realisasi Kegiatan/sub kegiatan Kinerja Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	104
50	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Persidangan Dan Risalah DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	105
51	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Persidangan Dan Risalah DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021	106

52	Rekapitulasi rapat DPRD kabupaten tanah Laut Tahun 2021	107
53	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran Sub Bagian Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	109
54	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	114
55	Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja berdasarkan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	56
56	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	118
57	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021	119
58	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	120
59	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.....	120
60	Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	122
61	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2021	123

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

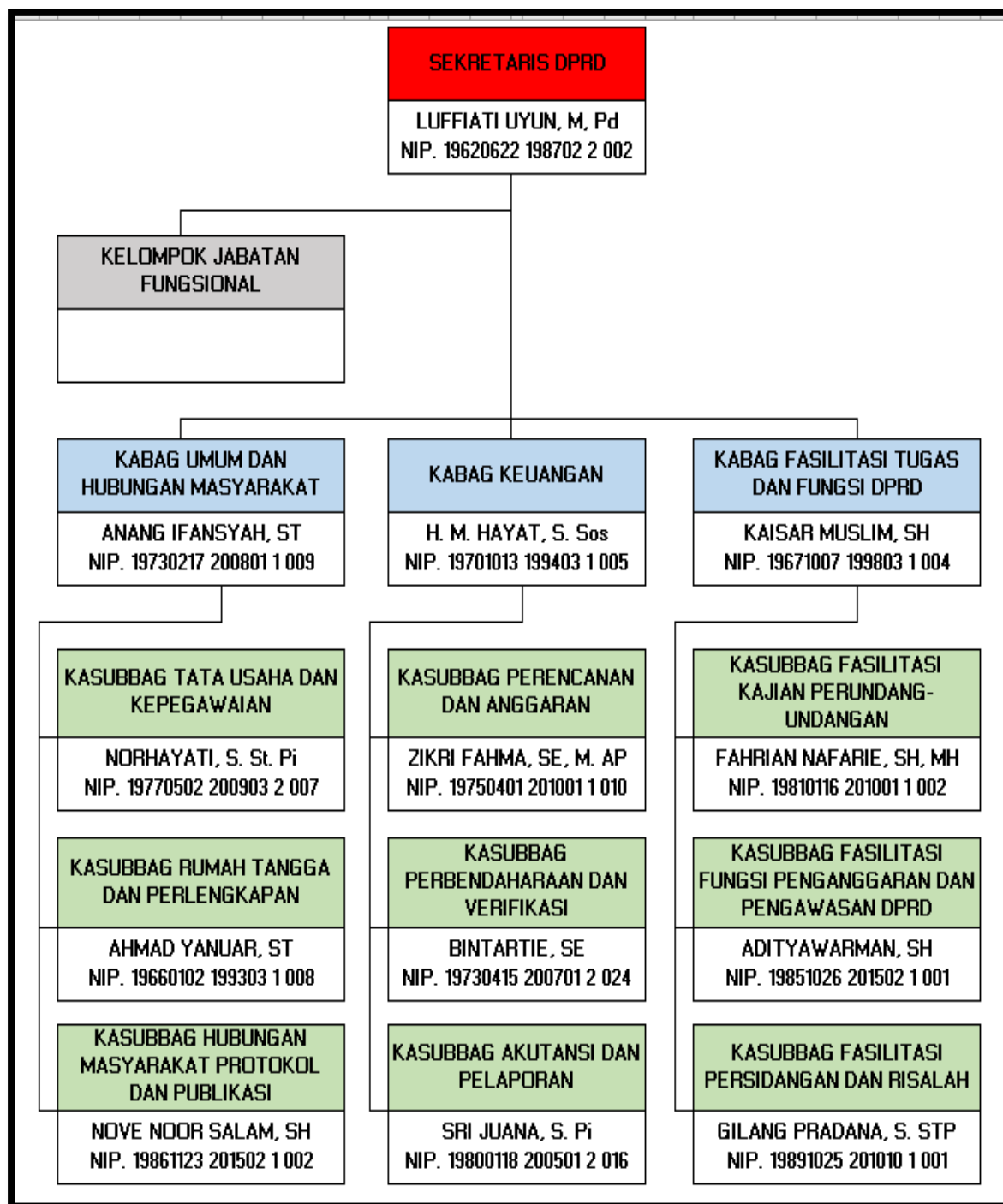
Atas dasar tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (Lkj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan dan media penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang

berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 64 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c). Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.
3. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b). Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - c). Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan
4. Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Risalah;
 - b). Sub Bagian Fasilitas Kajian Perundang-Undangan; dan
 - c). Sub Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD.
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang bersifat unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD dan Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang sekretariat Dewan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Merumuskan kebijakan umum Sekretariat DPRD berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan Sekretariat DPRD;
5. Mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas fasilitas rapat dan persidangan DPRD, fasilitasi urusan hukum dan perundang-undangan serta keprotokolan;
6. Mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas fasilitasi rapat dan persidangan DPRD, fasilitasi urusan hokum, dan perundang-undangan serta keprotokolan;
7. Mengoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal;
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

9. Menggordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan Sekretariat DPRD;
10. Menyelenggarakan urusan administrasi fasilitasi kegiatan DPRD dan keuangan Sekretariat DPRD serta DPRD;
11. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Menggordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kebutuhan;
13. Mengatur pelaksanaan koordinasi dengan unit atau satuan kerja terkait dengan menghadiri atau melaksanakan rapat untuk sinkronisasi/evaluasi program/kegiatan; dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola administrasi keanggotaan DPRD, serta menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan. Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan hubungan Masyarakat sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- b) Menyusun program, menggordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- c) Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e) Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

- f) Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g) Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i) Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j) Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- k) Menyelenggarakan publikasi;
- l) Menyelenggarakan keprotokolan;
- m) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibagian umum dan hubungan masyarakat; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud, kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a). Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian;
3. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD dan DPRD;
5. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan kersipan;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kepegawaian;

7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas para pegawai Sekretariat DPRD dan DPRD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan kegiatan administrasi dokumentasi dan perpustakaan DPRD;
9. Menganalisis kebutuhan, merencanakan, dan melaksanakan penyediaan tenaga ahli;
10. Memfasilitasi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia DPRD dan Sekretariat DPRD;
11. Memfasilitasi kegiatan Asosiasi Sekretariat DPRD (ASDEKSI) dan Asosiasi DPRD (ADKASI);
12. Memfasilitasi kegiatan pembekalan anggota DPRD;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

b). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
3. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
4. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks sekretariat DPRD;
5. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
6. Memfasilitasi penyiapan ruangan/tempat untuk upacara, rapat, pertemuan dan penerimaan tamu atau kegiatan lainnya secara kedinasan dan kelembagaan dewan maupun Sekretariat DPRD beserta peralatannya;

7. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
8. Mendistribusikan dan pengendalian dan bahan perlengkapan;
9. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
10. Menyediakan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
11. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
12. Menyediakan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
13. Melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan Sekretariat DPRD dan DPRD;
14. Melaksanakan penyediaan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan kantor;
15. Melaksanakan administrasi dan inventaris barang-barang rumah tangga Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
16. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
17. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
18. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c). Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi;
2. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
3. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
4. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
5. merencanakan kegiatan DPRD;

6. merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRD; dan
7. menyusun dan menyiapkan Naskah Pidato Pimpinan DPRD;
8. menyusun dan menatausahakan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang kegiatan SKPD;
9. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
10. melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan publikasi;
11. melaksanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur Humas, protocol dan publikasi;
12. melaksanakan fasilitasi kegiatan selain peringatan hari jadi dan hari besar nasional lingkup Sekretariat DPRD;
13. melaksanakan penyiapan bahan monitoring evaluasi pelaksanaan program/kerja kehumasan, keprotokolan dan publikasi;
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Sekretariat DPRD terkait tugas dan fungsinya;
15. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, DPRD, sekretariat daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian. Ruang lingkup bagian keuangan meliputi perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan. Adapun uraian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b) Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c) Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

- f) Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- g) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h) Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- i) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- j) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud, kepala Bagian Keuangan dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a). Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas Kasubbag. Perencanaan dan Anggaran sebagai berikut :

- 1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- 2. Menyusun bahan perencanaan Sekretariat DPRD;
- 3. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- 4. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- 5. Menghimpun rencana kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- 6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- 7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
- 8. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b). Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi

Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas Kasubbag. Perbendaharaan dan Verifikasi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perbendaharaan dan verifikasi;
2. Menyiapkan bahan penyusunan program atau kegiatan dan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis;
3. Mengoordinasikan kepada verifikator agar melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menggordinasikan kepada Bendahara/pembantu bendahara mengenai bahan persiapan pencairan gaji dan tunjangan DPRD;
5. Menggordinasikan kepada Bendahara/pembantu bendahara mengenai bahan persiapan pencairan gaji dan tambahan penghasilan PNS;
6. Mengoordinasikan kepada bendahara/pembantu bendahara mengenai bahan persiapan pembuatan Surat Persetujuan Pembayaran dan surat Perintah Membayar, baik Uang Persediaan, Ganti Uang, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer (gaji dan tunjangan dewan dan gaji serta tambahan penghasilan bagi PNS);
7. Memonitor pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang kas pada bendahara;
8. Mengoordinasikan kepada bawahan untuk mengelola, menyimpan/mengarsipkan bukti-bukti asli kegiatan transaksi uang;
9. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pada sub bagian perbendaharaan dan verifikasi untuk melakukan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya: dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

c). Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan

Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas Kasubbag. Akutansi dan Pelaporan sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub bagian akutansi dan Pelaporan;
2. Merencanakan penatausahaan keuangan;
3. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
4. Mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPj dan Laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
7. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian akutansi dan pelaporan ; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Bagian Fasilitasi dan Fungsi DPRD di pimpin oleh seorang Kepala Bagian. Ruang lingkup bagian fasilitasi dan fungsi DPRD meliputi fasilitasi persidangan dan risalah, kajian perundang-undangan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD. Adapun uraian tugas Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD sebagai berikut :

- a) Menyusun program, mengoordinasikan dan membina penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b) Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c) Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
- d) Memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;

- e) Mengevaluasi dan mengoreksi bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
- f) Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g) Mengevaluasi dan menganalisis risalah rapat;
- h) Menggordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- i) Memverifikasi, menggordinasikan, dan mengevaluasi Daftar Inventaris bermasalah;
- j) Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k) Memfasilitasi, memverifikasi dan menggordinasikan pembahasan KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan;
- l) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBD Perubahan;
- m) Memfasilitasi, memverifikasi dan menggordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- n) Memfasilitasi, memverifikasi dan menggordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- o) Memfasilitasi, memverifikasi dan menggordinasikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- p) Memfasilitasi, memverifikasi dan menggordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- q) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- r) Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- s) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- t) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- u) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- v) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

- w) Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
- x) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud, kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a). Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Risalah di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas Kasubbag Fasilitas Persidangan dan Risalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Risalah.
2. Merencanakan program kerja tahunan dan penyusunan jadwal rapat dan sidang, rencana kerja DPRD, antara Badan Musyawarah DPRD bersama SKPD terkait setiap akhir bulan berjalan atau sesuai kesepakatan;
3. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat sekaligus mengarsipkannya;
4. Memfasilitasi registrasi daftar hadir peserta rapat, serta dokumentasi kegiatan;
5. Memfasilitasi undangan untuk anggota DPRD yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD (AKD) serta untuk SKPD/Instansi Vertikal/Organisasi Masyarakat dan lain-lain;
6. Memfasilitasi konsumsi rapat, maupun fasilitas ruangan-ruangan rapat;
7. Memfasilitasi koordinasi antara anggota alat kelengkapan DPRD dengan SKPD/pihak terkait lainnya, untuk melancarkan hubungan kerja dan hasil kinerja yang diharapkan bersama;
8. Menyiapkan bahan-bahan rapat dan melaksanakan pendampingan penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD;

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Risalah; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b). Sub Bagian Fasilitas Kajian Perundang-Undangan

Sub Bagian Fasilitas Kajian Perundang-Undangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas Kasubbag Fasilitas Kajian Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasilitas Kajian Perundang-Undangan;
2. Menyusun program, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
3. Memfasilitasi dan melaksanakan kajian perundang-undangan;
4. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
5. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
6. Membuat konsep bahan penyiapan Draft Peraturan Daerah Inisiatif;
7. Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
8. Menyusun bahan daftar Inventarisir masalah;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Fasilitas Kajian Perundang-Undangan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c). Sub Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Sub Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Adapun uraian tugas Kasubbag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD sebagai berikut

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;
2. Merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBD Perubahan;
4. Menyusun bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan pronogsis enam bulan berikutnya;
6. Penyusunan bahan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati;
7. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
8. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
10. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
11. Menganalisis bahan dukungan pengawasan pengguna anggaran;
12. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
13. Memfasilitasi reses DPRD;
14. Merencanakan kegiatan *hearing* / dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
15. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
16. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
17. Melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Legislasi Daerah; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Isu Strategis

Permasalahan strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sehingga perlu untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merumuskan permasalahan strategis yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsinya pada tabel berikut :

Tabel 1. Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Tugas Pokok dan Fungsi			Permasalahan	
Tugas Pokok	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah		1.	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
			2.	Belum adanya perubahan pola pikir (<i>mindset</i>) terhadap tugas, pokok dan fungsi akibat adanya tingkat pendidikan aparatur yang berbeda sehingga terdapat ketidak sesuaian antara kemampuan aparatur dengan tugas, pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
			3.	Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam mengikuti diklat sehingga kualitas yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan.
			4.	Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana.
			5.	Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terdapat ketidak serasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian dalam Sekretariat DPRD.
			6.	Distribusi pekerjaan yang kurang merata sehingga terdapat penumpukan volume pada satu Bagian.
Fungsi	a.	penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;	7.	Kurang berfungsinya elemen-elemen penting pada Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja (<i>task environment</i>) Sekretariat DPRD.
	b.	penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;		
	c.	pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;		
	d.	penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;		
	e.	pengelolaan urusan kesekretariatan DPRD.		

Ditinjau dari tugas, pokok dan fungsi SKPD yang mempengaruhi permasalahan serta tinjauan terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 dan analisis faktor internal dan eksternal maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, Keputusan DPRD dan Raperda inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Dewan, kegiatan reses, hearing, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

2. Sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan.

Kondisi sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan peralatan yang canggih agar agenda persidangan dan pemaparan materi dapat dilaksanakan lebih cepat dan akurat.

3. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi isu yang harus ditindak lanjuti dengan upaya peningkatan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis. Program diklat dan bimtek bidang manajemen pemerintahan, sistem informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.

4. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah masih belum optimal.

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

D. Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang diberikan Sekretariat DPRD adalah berupa pelayanan dalam bentuk fasilitasi semua kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mencakup penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat - rapat DPRD, Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan, fasilitasi kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2021, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II
3. Eselon III
4. Eselon IV

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program
3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

- | | | |
|----------|---|---|
| Berkarya | : | Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. |
| Inovasi | : | Menciptakan inovasi disegala sendikehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. |
| Tertata | : | Membangun tata kelola pemerintahan yang baik {Good Governance) |
| Religius | : | Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat |
| Aktual | : | Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat |

B. Misi RPJMD

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas, Sekretariat DPRD termasuk pada Misi ke-3 yaitu “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good Goovernance*)”.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi ke 3 (tiga) yaitu : “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik” dan sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan “**Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD**”. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatnya kinerja layanan DPRD.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana, Kualitas SDM dan Kualitas Administrasi Kepegawaian.
3. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan informasi Publik, Kehumasan dan Keprotokolan DPRD.
4. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan Administrasi keuangan Sekretariat DPRD
5. Meningkatnya Fasilitas dalam rangka menunjang Kinerja DPRD

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target 5 tahunan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07 (Baik)	77,08 (Baik)	77,09 (Baik)	77,1 (Baik)	77,11 (Baik)
			Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi penyebaran informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan

masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja yaitu, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Tingkat kepuasan Anggota DPRD diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun Target IKU sekretariat DPRD Tanah Laut Tahun 2021 sebesar 77,09 atau katagori Baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab / Sumber data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM) (77,09)	Sekretaris DPRD

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2021 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa

hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2021 telah disepakati baik oleh Sekretaris, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
1.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut			
	1. Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Baik (77,09)	IKM
2.	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%	
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolannya DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	
		2. Persentase penyebaran informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	

3.	Kepala Bagian Keuangan		100%	
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	
4.	Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
	1. Meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%	
		2. Persentase fasilitas pembahasan rancangan Perda	100%	
		3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	
		4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	
5.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan			
	1. Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	45 jenis	
		2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	7 unit	
6.	Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi			
	1. Melaksanakan penyebaran informasi/pemberitaan DPRD	1. Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose	50 kali	
	2. Melaksanakan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan	2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	459 kali	
		3. Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	255 kali	
7.	Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian			
	1. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	1. Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen	
	2. Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	2. Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang	

	3. Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	3. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang	
	4. Melaksanakan fasilitasi pemeriksa kesehatan anggota DPRD	4. Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang	
	5. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	5. Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang	
8.	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran			
	1. Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	1. Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen	
9.	Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi			
	1. Melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD	1. Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1930 dokumen	
		2. Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	60 Dokumen	
10.	Kasubbag Akutansi dan Pelaporan			
	1. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan	1. Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7 Laporan	
	2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Akutansi SKPD	2. Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan	1.930 Dokumen	
11.	Kasubbag Fasilitasi Tugas-Tugas DPRD			
	1. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat DPRD	1. Jumlah Rapat yang difasilitasi	255 rapat	
	2. Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2. Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan & anggota yang dilaksanakan	1.347 kali	
12.	Kasubbag Fasilitasi kajian perundang-undangan			
	1. Melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda	1. Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi	19 Raperda	
13.	Kasubbag Fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD			
	1. Melaksanakan fasilitasi hearing dan penyerapan aspirasi	1. Jumlah heraing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama yang difasilitasi	4 kali	

		2. Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan	3 kali	
	2. melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	1. Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	3 dokumen	
		2. jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	6 dokumen	

F. Program dan Kegiatan

Tabel 5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.934.008.543
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850,00
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110,00
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660,00
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740,00
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156,00
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040,00
d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190,00
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600,00
f.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900,00
g.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300,00
h.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600,00
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.315.570,00
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.577.444,00
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.840,00
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.471.375.000,00
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
a.	Pengadaan Mebel	301.231.280,00
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.472.428.939,00
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.390.000,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.834.200,00
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.185.670,00
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.235.000,00
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.292.400,00
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.400.000,00
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.730.000,00
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.282.200,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	261.785.000,00
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
a.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.725.661.770,00
b.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	511.720.000,00
c.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00
9.	Layanan Administrasi DPRD	
a.	Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00
b.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	664.275.600,00
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.314.359.721
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
a.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00
b.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.732.659.090,00
c.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00
d.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	777.384.261,00
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
a.	Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00
b.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00
c.	Pembahasan APBD	6.825.200,00
d.	Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00
e.	Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00
f.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
a.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00
b.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00
c.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00
d.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00
e.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00
f.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00
g.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	
a.	Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00
b.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	567.723.500,00
c.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00
d.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00
e.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00
f.	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
a.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00
b.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00
c.	Pelaksanaan Reses	1.411.121.310,00
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	
a.	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0,00
b.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00
8.	Fasilitasi Tugas DPRD	
a.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00
b.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00
JUMLAH		69.248.368.264,00

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai **Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)** Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 adalah **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** dimana untuk pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 5 misi pembangunan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

Misi 1 <i>Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya :</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	<p>Peningkatan Akses, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran seperti diamanatkan dalam SPM bidang pendidikan, serta untuk menuntaskan wajar 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>Hal strategis lain yang perlu ditekankan adalah menyangkut ketepatan kelompok sasaran, baik pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun Kesetaraan.</p> <p>Karena ketepatan kelompok sasaran tersebut akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan di masa yang akan datang</p>
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik enterpreneur maupun pegawai.
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan.
		<p>Peningkatan pemyarakatan paradigma sehat serta keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.</p> <p>Peningkatan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan.</p>

		Terkait dengan program pelayanan kesehatan on call, maka diperlukan pedoman teknis yang komprehensif sebagai dasar penyelenggaraannya.
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan pendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
		Peningkatan realisasi pelaku perizinan dan non perizinan jenis non usaha sehingga pelaku usaha memenuhi persyaratan usaha yang telah ditetapkan.
		Peningkatan kinerja keluarga berencana untuk pengendalian angka kelahiran total (Total Fertility Rate) dan peningkatan kesejahteraan keluarga
		Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak administratif masyarakat serta meningkatkan ketepatan perhitungan jumlah penduduk sebagai dasar dari kebijakan publik.
		Peningkatan pelayanan kecamatan serta optimalisasi peran kecamatan dalam upaya gerakan desa membangun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kinerja pelayanan administrasi terpadu kecamatan perlu dikembangkan untuk memasukkan aspek (kandungan) lokal
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Peningkatan Hasil dari pembinaan adat dan budaya desa yang mendukung pengembangan perekonomian ditingkat desa
		Peningkatan keserasian kebijakan pembinaan kepemudaan untuk memastikan peningkatan jumlah organisasi pemuda aktif, presentasi wirausaha muda, serta persentase peroleh medali ditingkat nasional dan Provinsi
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Memfasilitasi pelayanan SKPD berbasis teknologi informasi
Misi 2		
<i>Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif,</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan inovasi dalam	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Upaya Penerapan Inovasi dalam pelayanan Publik melalui pola replikasi best practices

pelayanan Publik		yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di masyarakat	Peningkatan penerapan inovasi pada sistem produksi ditingkat usaha yang potensial
	Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian	Peningkatan pengembangan industri kreatif daerah skala kecil dan menengah
Misi 3		
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan maturitas Penerapan SPIP.
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pelayanan Publik SKPD.
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Peningkatan pemanfaatan data/informasi berbasis TI untuk mendukung penerapan e-Government
Misi 4		
Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat;		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan Birokrasi dan masyarakat	Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Penguatan kemitraan pengembangan pengamalan nilai-nilai keagamaan untuk peningkatan lembaga keagamaan dalam peningkatan toleransi keagamaan.
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Peningkatan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan
		Peningkatan kesadaran politik masyarakat yang mengarah pada kejujuran dan keadilan
	Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Diarahkan untuk peningkatan peran lembaga keagamaan dalam peningkatan produktivitas umat
Misi 5		
Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;		

Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (pembangunan inklusif)	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan inklusif. Peningkatan keserasian kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bermuara pada APBD yang Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Environment.
	Meningkatnya peranan Perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
	Menurunkan tingkat pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja untuk pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Pengurangan resiko bencana serta serta peningkatan penyelesaian gangguan trantibum
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas dan sumber daya energi	Meningkatnya Infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas dan sumber daya energi	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang meningkatkan interkoneksi antarpusat pertumbuhan
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
		Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Pengendalian pemanfaatan ruang
		Pengembangan bidang ketenaga listrikan
Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
		Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi sesuai potensi daerah
		Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
		Peningkatan kualitas fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah
		Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan khususnya di wilayah potensi serta peningkatan linkage sektoralnya.
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan untuk penguatan cadangan pangan serta desa berketahanan pangan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup. Peningkatan kinerja pengelolaan limbah dan persampahan
Peningkatan upaya membangun desa, menata kota	Meningkatnya desa membangun	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa untuk mendukung gerakan desa membangun
	Meningkatnya cakupan penataan perkotaan	Peningkatan keserasian perencanaan pengembangan kota kota untuk penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pengurangan permukiman kumuh.

Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2018-2023 akan berfokus pada pembinaan desa dan penataan kota (**desa dibina kota ditata**) dengan **bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas**. Dalam rangka pembinaan desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan akan menjalankan berbagai program pembangunan di setiap urusan kewenangan yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk penataan kota, program pembangunan yang dijalankan akan berfokus pada upaya mendorong kota menjadi kota yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Pembinaan desa dan penataan kota akan dijalankan secara sinergis antar perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Untuk mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, sesuai tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki Peran dalam pencapaian **misi ke 3 (tiga)** yaitu : **“Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”** sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dengan tujuan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi Informasi dengan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Repormasi pelayanan Publik, Meningkatkan Transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik, Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi daerah dan Kompetensi Aparatur.

2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

2.1. Target dan Capaian IKU

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Sekratraiat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon II sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penang-gungjawab
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM)	Sekretaris DPRD

Adapun untuk mengetahui katagori mutu pelayanan berdasarkan nilai interval, nilai interval konversi dan kinerja unit pelayanan pada hasil capaian indeks kepuasan hasil survey yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Realisasi capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan hasil Survey tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dengan Indeks Kepuasan sebesar 77,70. Berdasarkan Tabel 6 tersebut diatas maka mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan katagori **Baik**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2		4	5	6
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,09	77,70	100,79%

2.2. Uraian dan Analisis Capaian IKU

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

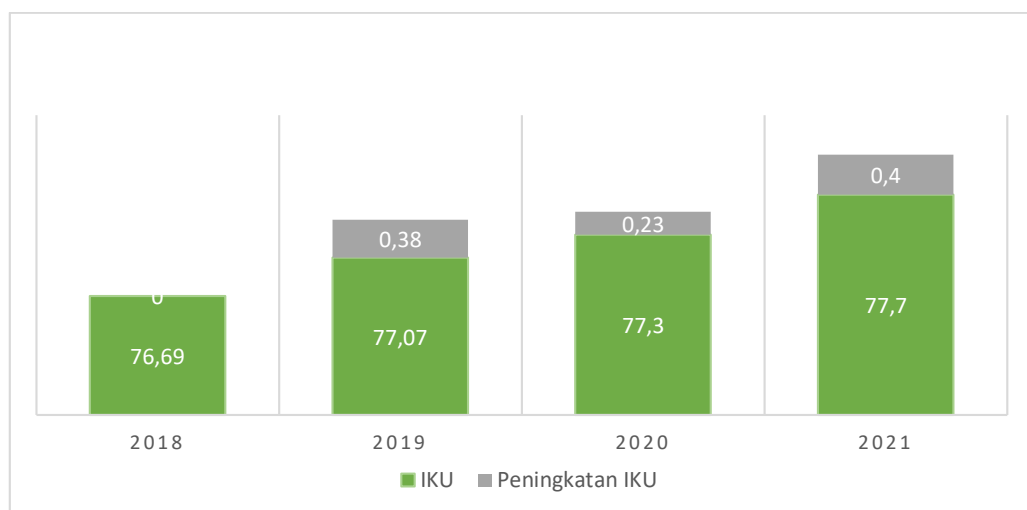
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD terealisasi dengan tingkat Baik (nilai 77,70) dari target Baik (nilai 77,09), sehingga dapat dilihat capaiannya adalah 100,79 %.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi IKU sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai dengan 2021 terjadi trend peningkatan capaian kinerja. Peningkatan kinerja setiap tahunnya meningkat dari 0,23 -0,4. Sekalipun trendnya meningkat, tapi di tahun 2019 ke 2020 peningkatan capaian menurun (0,23) dibandingkan dari tahun 2018 ke 2019 (0,38). Walaupun demikian peningkatan secara signifikan meningkat pada tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,4 point. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan grafik 1.

Tabel 10. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018 - 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					
			2018	2019	2020	2021		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan	76,69	77,07	77,30	77,09	77,7	100,79

**Grafik 1. Capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dan Jumlah Peningkatan Capaian Tahun 2018 – 2021**

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Kegiatan Survey kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dalam mengevaluasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Adapun Jenis pelayanan yang disurvei adalah:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Kemudahan prosedur pelayanan
3. Kecepatan pelayanan
4. Kepuasan dalam pelayanan kegiatan
5. Kesesuaian antara hasil produk layanan yang diberikan dengan

ketentuan yang telah ditetapkan/standar pelayanan.

6. Kompetensi/kemampuan petugas atau aparatur dalam memberikan pelayanan
7. Sikap dan perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam memberikan pelayanan
9. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Jumlah nilai unsur tertinggi ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai unsur terendah ada pada unsur sarana dan prasarana. Jumlah nilai IKM unit pelayanan sebesar 77,70. Hasil nilai unsur pelayanan berdasarkan jumlah nilai per unsur, jumlah nilai rata-rata per unsur, dan jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur, IKM per unsur dan IKM Unit Pelayanan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Nilai Per Unsur, Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur, Dan Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per Unsur Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun 2021

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Σ Nilai Per Unsur	109	113	104	104	106	108	111	99	126
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3,11	3,23	2,97	2,97	3,03	3,09	3,17	2,83	3,60
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0,111	0,35	0,36	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,31	0,40
IKM Per unsur	8,64	8,96	8,25	8,25	8,40	8,56	8,80	7,85	9,99
IKM Unit Pelayanan	77,70								

Berdasarkan hasil survey nilai IKM Unit pelayanan memperoleh nilai 77,70. Nilai tersebut berada pada rentang nilai interval konversi 76,61-88,30 dengan mutu pelayanan B yang berarti kinerja unit pelayanan ada pada katagori **Baik**.

Berdasarkan tabel 8, jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) perunsur diperoleh data 4 unsur memiliki nilai interval berada pada kisaran nilai 2,60 – 3,064 dengan mutu pelayanan **C (Kurang baik)** yaitu waktu pelayan (U3), pelaksanaan kegiatan (U4), produk layanan (U5) serta sarana dan prasarana (U8). Sedangkan 4 unsur lainnya berada pada kisaran nilai 3,0644-3,53 dengan mutu pelayanan **B (baik)** yaitu unsur persyaratan (U1), prosedur pelayanan (U2), kompetensi petugas (U6) dan perilaku petugas (U7). Satu unsur yang memiliki nilai interval 3,6 yang masuk dalam katagori **A (sangat baik)** yaitu unsur penanganan terhadap pengaduan saran dan masukan.

Nilai IKM Unit pelayanan yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 masih bisa dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan agar kinerja unit pelayanan kedepannya bisa lebih baik/meningkat.

Dari hasil survey yang dilaksanakan tersebut menghasilkan mutu pelayanan dengan kinerja baik dalam rangka memberikan pelayanan oleh sekretariat DPRD terhadap pengguna layanan yang dalam hal ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Namun perlu disadari bahwa bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada “pelanggan” yang dalam hal ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagaimana pendapat responden yang masih merasakan hal-hal kekurangan tersebut. Mutu pelayanan dengan kinerja baik tersebut adalah capaian yang harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang. Semua unsur penilaian perlu mendapat perhatian, terutama unsur-unsur yang masih masuk dalam katagori C. Kekurangan-keurangan diatas harus segera diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa mendatang antara lain :

- a) Perbaikan sistem dan tata kerja untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan dan memberikan kecepatan dalam memberikan pelayanan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pengguna layanan.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana fisik pendukung dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c) Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap para pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan.
- d) Melakukan *reward* dan *punishment* dalam organisasi Sekretariat DPRD yang akan dapat membawa pengaruh positif terhadap organisasi. dimana :
 - Mekanisme dan sistem kerja akan menjadi lebih baik, karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas,
 - Kinerja individu dalam organisasi semakin meningkat, karena adanya sistem pengawasan yang obyektif dan tepat sasaran,
 - Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi.

d. Analisis Program penunjang

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD di dukung oleh 2 (dua) Program penunjang, 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 5 (halaman 30) bab II.

Program penunjang dengan pagu Rp. 69.248.368.264.- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah.-*). dan realisasi sebesar Rp. 45.174.057.250.- (*Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.-*). atau 65,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Realisasi Program Penunjang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.934.008.543	32.123.450.796	86,98
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.314.359.721	13.050.606.454	40,39
JUMLAH		69.248.368.264	45.174.057.250	65,23

Dari tabel 12 tersebut diatas, jumlah realisasi terendah ada pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu sebesar Rp. 13.050.606.454.- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Enam ratus Enam ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah.-*) dari pagu Rp. 32.314.359.721 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah.-*) dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 40,39%. Serapan tertinggi ada pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai Rp. 32.123.450.796 (*Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam*

Rupiah.-) dari pagu Rp. 36.934.008.543 (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ribu Lima ratus Empat Puluh Tiga Rupiah.-/) dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 86,98%. Secara keseluruhan realisasi keseluruhan program adalah sebesar Rp. 45.174.057.250 (*Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.-)* dari pagu 69.248.368.264 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah.-)* dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 65,23% .

1. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran Strategis Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian memiliki 4 indikator yaitu 1). Persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dengan realisasi 94,04% dari target 100%, 2). Persentase pemenuhan tenaga ahli dengan realisasi 320% dari target 100%, 3). Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana dengan realisasi 114,28% dari target 100% dan 4). Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan realisasi 66,29% dari target 100%.

Sasaran strategis ke 2 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan publik dengan 2 indikator kinerja yaitu 1). persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dengan realisasi 127,19 % dari target 100% dan 2). Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dengan realisasi 166% dengan target 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 13. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	94,04%	94,04
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	320%	320,00
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	114,28%	114,28
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%	66,29%	66,29
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	127,19%	127,19
		2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	166%	166,00

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian realisasi perindikator kinerja dengan target 100% untuk semua indikator kinerja memiliki realisasi capaian kinerja yang kurang dari 100% adalah indikator Persentase pengelolaan umum dan kepegawaian (94,04%) dan Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia (66,29%).

Realisasi indikator kinerja yang lebih dari 100% ada 4 indikator satu diantaranya mencapai lebih 3 kali lipat dari target yaitu Persentase pemenuhan tenaga ahli (320%) dan yang lain adalah Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana (114,28%),

persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya (127,19 %) dan Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD (166%) .

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dibandingkan tahun 2019 sebesar 100% terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 5,3 % dan tahun 2021 sebanyak 5,6%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada capaian persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dari capaian 100% pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 320% pada tahun 2021.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana meningkat pada tahun 2021 sebanyak 114,28% dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 100%. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia menurun dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan terjadi sejak tahun 2020 yang mencapai 80% dan 2021 sebesar 66,29%.

Peningkatan juga terjadi pada persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dan realisasi penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100	94,7	100%	94,04%	94,04%
		Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100	100	100%	320%	320%
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100	100	100%	114,28%	114,28%
		Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	89	80	100%	66,29%	66,29%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolannya DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100	97,25	100%	127,19%	127,19%
		Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100	100	100%	166%	166%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib bersumber dari dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani tahun 2021 merupakan data yang bersumber dari aktivitas organisasi yang bersumber dari kegiatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar serta dokumen kepegawaian yang dikelola. Untuk meningkatkan indikator kinerja, langkah kedepan yang harus diambil oleh Sekretariat DPRD adalah :

- memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;
- mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian;
- Meningkatkan pembinaan untuk mencapai kesejahteraan pegawai;
- Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian yaitu menyeimbangkan

jumlah pegawai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD , menyesuaikan beban kerja yang ada dengan jumlah pegawai. Hal ini dilakukan untuk memastikan porsi atau kapasitas pekerjaan setiap pegawai sesuai dengan kemampuan dan beban kerjanya. Hasilnya di beberapa bagian masih kekurangan jabatan fungsional umum yang berdampak pada kemampuan dan beban kerja yang lebih. Solusi yang diambil adalah menyampaikan surat permintaan jabatan fungsional umum ke BKPSDM baik melalui mutasi ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut maupun melalui Penerimaan CPNS dan PPPK.

Kegiatan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah berasal dari realisasi Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang difasilitasi tahun 2021 adalah merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi ASN dalam bentuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan lembaga resmi, dimana terlaksana sebanyak 15 orang (100%) dari target 15 orang dan diklat/bimtek anggota DPRD yang ditargetkan 175 orang hanya terealisasi 57 orang (32,57%). Realisasi dari 2 kegiatan tersebut diperoleh rata-rata capaian 66,29%. Tidak tercapainya target diklat/bimtek Anggota DPRD pada akhirnya sangat mempengaruhi realisasi keseluruhan untuk indikator kinerja persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia. kondisi pandemi virus covid 19 cukup berpengaruh dalam pelaksanaan target kinerja seperti pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap kegiatan yang sifatnya tatap muka dan mengumpulkan orang banyak. Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD tercapai 320% dari target 100%. Capaian ini terpenuhinya tenaga ahli sebanyak 1 orang untuk masing-masing komisi I, komisi II, komisi III, banggar, bapemperda dan masing-masing fraksi. Secara khusus Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk memberikan dukungan keahlian atau

substansi kepada Anggota Dewan, Alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya bantuan tenaga ahli, kemampuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat lebih meningkat dan berkualitas sehingga menguasai materi muatan dan substansi peraturan dewan.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana mencapai 114,28% dari target 100%. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana meliputi pengadaan sarana prasarana tahun 2021 yang mencapai target realisasi 100% dan pemeliharaan sarana prasarana yang mencapai 128,57% . Peningkatan pemenuhan layanan sarana dan prasarana diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kepuasan dan mempercepat proses kerja sehingga produktivitas kegiatan meningkat.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya mencapai 127,19%. Pelayanan kehumasan dan keprotokolan kegiatan DPRD oleh sekretariat DPRD meliputi penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang informasi dan pemberitaan, pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi; serta penyelenggaraan kebijakan bidang informasi dan pemberitaan, pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi. Jumlah Pelayanan dihitung dari jumlah terlaksananya pelayanan kehumasan dan keprotokolan terhadap rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan serta kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD selama tahun 2021.

Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD tahun 2021 mencapai 166% dari target 100%. Penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dilakukan melalui beberapa media cetak antara lain B.Post, Barito Pos, Radar Banjarmasin dan melalui media online lainnya.

4. Analisis Program Penunjang

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 mengampu 1 program, 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 9.715.776.257.- (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah.-*). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.516.023.705.- (*Enam Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah.-*) dengan realisasi capaian persentase keuangan sebesar 67,07% dari pagu anggaran 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	
		Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.715.776.257	6.516.023.705	67,07
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	619.970.160,00	88,35
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	28.900.000,00	98,38
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	83.599.377,00	55,00
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.315.570,00	29.535.600,00	94,32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.577.444,00	41.657.300,00	91,40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.840,00	20.373.400,00	62,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.471.375.000,00	1.397.261.446,00	94,96
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
Pengadaan Mebel	301.231.280,00	216.785.000,00	71,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.472.428.939,00	1.036.269.525,00	70,38

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	
		Rp	%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.834.200,00	230.332.854,00	86,97
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.185.670,00	21.411.500,00	78,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.235.000,00	180.880.000,00	90,79
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.292.400,00	217.844.350,00	46,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.400.000,00	49.576.051,00	54,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.730.000,00	35.786.500,00	94,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.282.200,00	9.504.000,00	27,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	261.785.000,00	215.274.000,00	82,23
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	511.720.000,00	388.438.000,00	75,91
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	45.538.200,00	65,05
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>			
Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00	480.162.487,00	26,18
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	567.723.500,00	452.780.500,00	79,75
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	252.174.300,00	50,82
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	219.670.755,00	73,31
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00	152.721.400,00	90,92
<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>			
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00	85.187.000,00	59,82

1.1 Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ada 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja. Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani mencapai 2.415 dokumen (94,04%) dari target 2.568 dokumen, Jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sebesar 15 orang (100%) dari target 15 orang, Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sebesar 57 orang (32,57%) dari target 175 orang, jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya terealisasi 32

orang (91,43%) dari target 35 orang serta jumlah tenaga ahli yang disediakan terealisasi 16 orang (320%) dari target 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen	2415 dokumen	94,04%
2.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang	15 orang	100%
3.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang	57 orang	32,57%
4.	Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang	32 orang	91,43%
5.	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang	16 orang	320%

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi kinerja dari target yang ditetapkan diperoleh data sebagai berikut:

- jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani mencapai 2.415 dokumen (94,04%) dari target 2.568 dokumen;
- Jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sebesar 15 orang (100%) dari target 15 orang;
- Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sebesar 57 orang (32,57%) dari target 175 orang;
- jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya terealisasi 32 orang (91,43%) dari target 35 orang; dan
- jumlah tenaga ahli yang disediakan terealisasi 16 orang (320%) dari target 5 orang.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani dari tahun 2019 menurun pada tahun 2020 sebanyak 207 dokumen dan dari tahun 2020 ke 2021 menurun kembali sebanyak 17 dokumen.

Realisasi jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sejak tahun 2019 meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 yang terealisasi 100% dari target.

Realisasi jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sejak tahun 2019 menurun realisasinya sebanyak 210 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 57 orang, meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah peningkatan sebanyak 24 orang dari realisasi tahun 2020 sebanyak 33 orang. Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya pada tahun 2019 sebanyak 33 orang dan pada tahun 2020 tidak terealisasi sama sekali. Namun pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 32 orang dengan serapan 91,43% dari target.

Jumlah tenaga ahli DPRD yang tersedia pada tahun 2019 tersedia 3 orang dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 4 orang. Pada tahun 2021 terealisasi 16 tenaga ahli dengan persentase capaian 320%.

Tabel 17. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.639 dokumen	2432 dokumen	2568 dokumen	2415 dokumen	94,04%
2.	Melaksanakan fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	11 orang	12 orang	15 orang	15 orang	100%
3.	Melaksanakan fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	210 kali	33 kali	175 orang	57 orang	32,57%
4.	Melaksanakan fasilitas pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	33 orang	0 orang	35 orang	32 orang	91,43%
5.	Melaksanakan pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	3 orang	4 orang	5 orang	16 orang	320%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani tahun 2021 merupakan data yang bersumber dari aktivitas organisasi yang bersumber dari kegiatan surat menyurat baik masuk maupun keluar

serta dokumen kepegawain yang dikelola. Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan administrasi dan kepegawaian Sekretariat DPRD di dukung dengan jumlah pegawai 84 orang yaitu terdiri dari 32 orang ASN, 36 orang PTT, 8 orang Tenaga Ahli AKD dan 8 orang Tenaga Ahli Fraksi. Adapun nama jabatan, eselon dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Sekretaris	II b	1	0	1
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	III a	1	0	1
	Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	4	0	4
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	4	4
	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	3	0	3
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	16	16
	Kepala Sub Bagian HUBungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	2	0	2
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	3	3
3	Kepala Bagian Keuangan	III a	1	0	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	2	0	2
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	1	1
	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	2	0	2
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	2	2
	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	1	0	1
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	2	2
4	Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	III a	1	0	1
	Kepala Bagian Fasilitas Persidangan dan Risalah	IV a	1	0	1

No	Nama Jabatan	Esselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	3	0	3
	- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	0	2	2
	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan	IV a	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	1	0	1
	- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	0	1	1
	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	IV a	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	1	0	1
	- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	0	5	5
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	0	0	0
6	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	-	0	8	8
7	Tenaga Ahli Fraksi	-	0	8	8
JUMLAH			32	52	84

Pegawai ASN lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebanyak 32 orang . Pegawai yang memiliki pangkat golongan 4 sebanyak 3 orang, golongan 3 sebanyak 17 orang, golongan 2 sebanyak 11 orang dan golongan 1 sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2021

No.	Jenis Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tk. I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk.I	III/d	3
7	Penata	III/c	5
8	Penata Muda Tk.I	III/b	4
9	Penata Muda	III/a	5
10	Pengatur Tk.I	II/d	8

No.	Jenis Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah
11	Pengatur	II/c	2
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13	Pengatur Muda Tk.I	II/a	1
14	Juru Tk I	I/d	1
15	Juru Tk I	II/c	-
16	Juru Muda Tk.I	II/b	-
17	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			32

Pendidikan terakhir pegawai sekretariat DPRD tahun 2021 dari 84 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sekolah dasar sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA/SMK sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 8 orang, D4 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 30 orang dan master/pasca sarjana sebanyak 9 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2	-	2
2	SLTP	-	1	1
3	SLTA / SMK	12	20	32
4	D.1	-	-	-
5	D.2	-	-	-
6	D.3	2	6	8
7	D.4	2	-	2
8	Sarjana (S.1)	11	19	30
9	Master / Pasca Sarjana	3	6	9
10	Dokter / S3	-	-	-
JUMLAH		32	52	84

Dengan kondisi pegawai sebagaimana dijelaskan diatas, sangat diharapkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian kedepannya bisa lebih baik dan dapat lebih ditingkatkan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia.

Realisasi Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi tahun 2021 adalah merupakan kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana terlaksana sebanyak 57 kali. Capaian kinerja belum optimal, hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi virus covid 19, dimana dilakukan pembatasan-pembatasan oleh Pemerintah terhadap kegiatan yang sifatnya tatap muka dan mengumpulkan orang banyak. Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka peningkatan kemampuan teknis DPRD Kabupaten Tanah Laut, karena kegiatan ini sangat penting terutama dalam rangka untuk menyikapi terhadap ketentuan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Realisasi Diklat / Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan aparatur ASN lingkup sekretariat tercapai 100% yaitu 15 orang dari target. Untuk kedepannya semoga bisa lebih ditingkatkan lagi mengingat jumlah ASN yang melaksanakan diklat/bimteks baru mencapai 46,8% dari jumlah ASN sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD terealisasi 16 orang dari target 5 orang dengan persentase capaian 320%. Realisasi tenaga ahli yang disediakan tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan PP 18 tahun 2017. Adapun 16 orang tenaga ahli tersebut terdiri dari :

- 8 orang tenaga ahli AKD dengan rincian : 3 orang untuk Komisi I, Komisi II dan komisi III, Badan Anggaran sebanyak 1 orang dan Bapemperda 1 orang
- 8 orang tenaga ahli fraksi dengan rincian 1 orang per fraksi yaitu fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PKB dan Demokrat.

Realisasi Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya pada tahun 2021 sebanyak 32 orang dari 35 anggota DPRD. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 12, 13 dan 19 Juli tahun 2021 di lantai 3 ruang MCU RSUD Haji Boejasin Pelaihari. 3 orang yang tidak melaksanakan kegiatan MCU dikarenakan dalam proses Pengganti Antar Waktu (PAW).

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD mengampu 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Adapun jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 5.829.813.614.- (*Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah.-*) dengan realisasi sebesar Rp. 3.742.769.625.- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah.-*) dan persentase serapan keuangan sebesar 64,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Kegiatan/sub kegiatan Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.829.813.614	3.742.769.625	64,20
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	619.970.160,00	88,35
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	28.900.000,00	98,38
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	83.599.377,00	55,00
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.840,00	20.373.400,00	62,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.471.375.000,00	1.397.261.446,00	94,96
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.185.670,00	21.411.500,00	78,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.235.000,00	180.880.000,00	90,79
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	511.720.000,00	388.438.000,00	75,91
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	45.538.200,00	65,05
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>			
Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00	480.162.487,00	26,18
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	252.174.300,00	50,82
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	219.670.755,00	73,31

1.2 Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebanyak 1 sasaran dan 2 indikator kinerja. Indikator kinerja jumlah pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 45 jenis pengadaan sarana dan prasarana dari target 45 jenis dengan realisasi persentase capaian 100%. Sedangkan realisasi indikator kinerja jumlah sarana dan

prasarana yang terpelihara dengan baik sebanyak 9 unit dari target 7 unit dengan realisasi persentase capaian 128,57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 22. Realisasi Capaian Indikator Kinerja kasubbag Rumah tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	45 jenis	45 jenis	100
		2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	7 unit	9 unit	128,57

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, target jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan mencapai target 100% sedangkan jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik melebihi target hingga mencapai 128,57%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan tahun 2021 dibandingkan realisasi tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dari segi jumlah jenis. Hal ini disebabkan jenis pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang pada tahun berkenaan. Walaupun dari segi jumlah menurun setiap tahunnya namun realisasi pengadaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mencapai 100%.

Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik tahun 2021 dan 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan dari 43 unit menjadi 7 unit pada tahun 2020 dan 9 unit pada tahun 2021. Persentase capaian kinerja mencapai 128.57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi Capaian Indikator Kinerja kasubbag Rumah tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	80 unit	50 unit	45 jenis	45 jenis	100%
		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	43 unit	7 unit	7 unit	9 unit	128,57%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan tahun 2021 adalah merupakan kegiatan dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi rencana kebutuhan barang selama tahun berjalan sehingga berdasarkan kebutuhan pada perhitungan jumlah pengadaan sarana dan prasarana ditetapkan 45 jenis. Adapun sarana dan prasarana yang dilaksanakan adalah : pengadaan mebeulair, alat ukur termoface digital, alat pendingin ruangan, peralatan dan kelengkapan computer, pembuatan rumah genset, karpet panggung ruang paripurna, pengadaan TV dan kelengkapannya, peralatan listrik , peralatan dapur serta alat dan bahan pembersih/pengharum ruangan.

Realisasi jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara tahun 2021 merupakan kegiatan pemeliharaan bangunan, pemeliharaan unit kendaraan roda 4 dan roda 2, pemeliharaan mebeulair, pemeliharaan alat pendingin ruangan, genset, jaringan lampu, jaringan listrik, jaringan air dan pemeliharaan computer dan kelengkapan lainnya.

Sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi diusulkan penghapusan asset ke BPKAD. Sedangkan yang rusak sedang dan rusak ringan masuk dalam pemeliharaan agar daya guna barang bisa diperpanjang dan dapat digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

4. Analisis Program Penunjang

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mengampu 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan pagu Rp.3.007.877.033.- (*Tiga Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah.-*). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 2.082.565.180.- (*Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Lima ratus enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah.-*) dengan realisasi persentase keuangan sebesar 69,24%. Karena kegiatan sebagian besar adalah pengadaan barang dan terjadi efisiensi harga beli menyebabkan banyaknya sisa anggaran yang terakumulasi yang berpengaruh besar dalam besaran serapan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Realisasi Kegiatan/sub kegiatan Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.007.877.033	2.082.565.180	69,24
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.315.570	29.535.600	94,32
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.577.444	41.657.300	91,40
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
Pengadaan Mebel	301.231.280	216.785.000	71,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.472.428.939	1.036.269.525	70,38
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.834.200	230.332.854	86,97
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.292.400	217.844.350	46,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.400.000	49.576.051	54,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.730.000	35.786.500	94,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.282.200	9.504.000	27,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	261.785.000	215.274.000	82,23

1.3 Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran Strategis Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah melaksanakan penyebaran informasi/pemberitaan humas dan melaksanakan

penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan. Dari dua sasaran tersebut ada 3 indikator kinerja yaitu 1). jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose dengan realisasi 83 kali dari target 50 kali dengan persentase capaian kinerja 166%, 2). Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dengan realisasi 561 kali dari target 459 dengan persentase capaian kinerja 122,22%, dan 3). Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi dengan realisasi 337 kali dari target 255 kali dengan persentase capaian 132,16%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan penyebaran informasi /pemberitaan DPRD	1. Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose	50 kali	83 kali	166,00
2.	Melaksanakan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan	2. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	459 kali	561 kali	122,22
		3. Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	255 kali	337 kali	132,16

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi semua indikator kinerja melampaui jumlah target yang ditetapkan. Jumlah pemberitaan DPRD yang di ekspose mencapai 166 %, jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 122,22 % dan jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi mencapai 132,16%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose terjadi trend peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan persentase capaian kinerja diatas $\geq 100\%$. Hal ini terlihat dari data 2019 realisasi 10 kali pemberitaan/ekspose meningkat menjadi 50 kali pemberitaan pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 83 kali.

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 31 kali (5,78%) yaitu dari 592 kali pada tahun 2020 menjadi 561 kali pada tahun 2021. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi adalah jumlah rapat-rapat dan jumlah koordinasi/konsultasi yang difasilitasi oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi dalam melaksanakan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan. Kondisi pandemic COVID-19 cukup besar mempengaruhi realisasi target kinerja karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi tahun 2019 sampai dengan 2021 meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan rekapitulasi rapat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ada 14 macam rapat yang terlaksana selama tahun 2021 mencapai 337 kali rapat yang terfasilitasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyebarluasan informasi/ pemberitaan DPRD	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose	10 kali	50 kali	50 kali	83 kali	166%
2	Melaksanakan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		592 kali	459 kali	561 kali	122,22%
		Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	53 kali	248 kali	255 kali	337 kali	132,1569

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan pemberitaan DPRD yang diekspose tidak lepas dari peranan bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Tahun 2021 dalam mengelola pemberitaan dengan media massa baik media cetak, media online dan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan pesan kepada sasaran informasi dalam hal ini adalah masyarakat. Dampak pemberitaan DPRD yang diekspose oleh media merupakan sarana yang bagus bagi anggota DPRD untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik .

jumlah rapat koordinasi berdasarkan jumlah perihal yang dikoordinasikan/dikonsultasikan dan jumlah rapat yang dilaksanakan sebesar 561 kali terdiri dari jumlah penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan pada rapat yang dilaksanakan oleh DPRD berjumlah 337 kali dan jumlah konsultasi yang dilaksanakan DPRD selama tahun 2021 sebanyak 224 kali. Penurunan jumlah realisasi

dibandingkan tahun 2020 disebabkan kondisi pandemic COVID-19 melakukan pembatasan mobilitas masyarakat.

4. Analisis Program Penunjang

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 mengampu 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.878.085.610.- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam ratus sepuluh Rupiah.-*). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 690.688.900.- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah.-*) dengan persentase capaian 78,66%.

Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi memiliki realisasi anggaran paling rendah hanya mencapai 59,82%, hal ini disebabkan karena kegiatan kepesertaan pameran dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanah Laut tidak terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	878.085.610	690.688.900	78,66
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>			
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	567.723.500	452.780.500	79,75
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390	152.721.400	90,92
<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>			
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720	85.187.000	59,82

2. Kepala Bagian Keuangan

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis di bagian keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Sekretariat DPRD. Target kinerja yang ditetapkan adalah katagori BB (sangat baik) . Realisasi indikator kinerja tahun 2021 memperoleh nilai SAKIP sebesar 77,89 dengan katagori BB (sangat baik) dengan demikian capaian target terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	BB (sangat Baik)	100

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2021 mencapai 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Nilai SAKIP sekretariat DPRD Tahun 2019 sampai dengan 2021 meningkat dari katagori B menjadi BB, walaupun tahun 2020 ke 2021 masih dikatagori BB namun dari segi nilai ada peningkatan sebesar 1,81 point. Secara keseluruhan capaian target telah tercapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B 67,54	BB 76,08	BB	BB 77,89	100

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2 (dua) tahun terakhir terjadi

peningkatan terutama di komponen perencanaan kinerja (0,11 point), pelaporan kinerja (0,53 point) dan evaluasi internal (1,29 point). Sedangkan penurunan nilai evaluasi ada pada komponen pencapaian kinerja (0,12 point). Untuk komponen pengukuran kinerja nilai evaluasi tetap tidak ada peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2021

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Tahun Penilaian	
		2020	2021
1	perencanaan kinerja	26,81	26,92
2	pengukuran kinerja	19,38	19,38
3	pelaporan kinerja	10,07	10,6
4	evaluasi internal	5,26	6,55
5	pencapaian kinerja	14,56	14,44
JUMLAH		76,08	77,89

Predikat BB dengan nilai 77,89 maka Sekretariat DPRD dengan interpretasi SKPD yang akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Walaupun demikian ke 5 (lima) komponen penilaian masih dapat ditingkatkan dengan berusaha maksimal dalam meningkatkan peran serta dan perbaikan secara terus menerus agar tercapai predikat A (memuaskan) atau AA (sangat memuaskan).

Upaya yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan Nilai implementasi SAKIP Sekretariat DPRD ke depannya antara lain :

1. **Perencanaan Kinerja** ; melakukan reviu pada target indikator kinerja dengan menyesuaikan keadaan (up to date)

2. **Pengukuran Kinerja** ; memanfaatkan target kinerja untuk penilaian prestasi kinerja individu, reward dan punishment serta penilaian prestasi kerja bagi pejabat yang telah menandatangani PK.
3. **Pelaporan Kinerja**; menginformasikan data kinerja, yang sesuai kriteria penyusunan dan juga menginformasikan penggunaan sumberdaya baik SDN dan lainnya serta untuk menjamin keandalan data kinerja perlu menunjuk petugas yang menangani pengumpulan dan analisis data kinerja
4. **Evaluasi Kinerja**: lebih memperhatikan dan memantau evaluasi terhadap rencana aksi untuk memperbaiki dan mengendalikan kinerja.
5. **Capaian Kinerja**; meningkatkan capaian target kinerja agar bisa meningkatkan nilai hasil evaluasi implementasi

4. Analisis Program Penunjang

Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 mengampu 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan jumlah Pagu Rp. 30.032.555.256,- (*Tiga Puluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 26.633.392.333.- (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah.-*) atau dengan kata lain 88,68% dari pagu anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.032.555.256	26.633.392.333	88,68
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540	8.525.400	53,05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800	4.390.900	36,24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850	13.867.400	35,20
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110	8.475.600	53,33
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660	2.548.500	23,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740	8.449.500	47,44
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	-
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156	4.014.242.350	78,19
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040	17.366.600	88,55
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190	11.270.530	43,12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600	2.379.600	40,18
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900	1.273.000	32,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300	1.233.850	44,01
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600	1.319.200	54,93
<i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.725.661.770	22.538.049.903	91,15

2.1 Kasubbag Perencanaan dan Anggaran

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD. Target indikator kinerja tahun 2021 sebanyak 6 dokumen dengan realisasi sebanyak 6 dokumen dengan kata lain capaian kinerja mencapai 100%. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

- 1). Dokumen Renja Murni;
- 2). Renja Perubahan;
- 3). DPA murni (termasuk RKA);
- 4). DPA perubahan (termasuk RKA-P);
- 5). Penetapan Kinerja (PK) murni; dan
- 6). Penetapan Kinerja Perubahan.

Tabel 32. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2021 mencapai 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian indikator kinerja sub bagian perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD tahun dibandingkan pada tahun 2019, terjadi peningkatan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sama-sama mencapai target kinerja dengan persentase capaian 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian %
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	4 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi Target Indikator Kinerja mencapai 100% pada tahun 2021 meliputi 1). dokumen renja murni, 2). renja perubahan, 3). DPA murni (termasuk RKA), 4). DPA perubahan (termasuk RKA-P), 5). penetapan kinerja (PK) murni dan 6). penetapan kinerja perubahan.

Semua dokumen tersebut adalah dokumen yang harus tersedia dan tersusun dengan baik. Dokumen perencanaan dan penganggaran berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD mengampu 1 (satu) kegiatan dan 6 sub kegiatan. Adapun Jumlah Pagu kegiatan sebesar Rp. 94.322.960.- (*Sembilan Puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah.-*) dengan realisasi Rp. 37.807.800.- (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah.-*) dengan kata lain persentase capaian keuangan 40,08 % . Walaupun capaian keuangan sebesar 40,08% tetapi capaian fisik mencapai 100%. Dari anggaran yang tersedia, dana konsumsi rapat internal tidak terserap dikarenakan adanya Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang yang mengatur biaya konsumsi rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainya atau masyarakat. Walaupun demikian rapat kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran tetap dilaksanakan.

Tabel 34. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	
		Rp.	%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540	8.525.400	53,05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800	4.390.900	36,24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850	13.867.400	35,20
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	15.893.110	8.475.600	53,33
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660	2.548.500	23,50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	-
JUMLAH	94.322.960	37.807.800	40,08

2.2 Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran Strategis Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi adalah melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD dengan dua indikator kinerja yaitu jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan dan jumlah dokumen SPMU yang telah diterbitkan. Realisasi target jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan sebesar 1.930 dokumen dengan realisasi 2.357 dokumen (122,12%) dan jumlah dokumen SPMU dengan target 60 dokumen terealisasi 91 dokumen (151,67%). Dokumen SPM yang diterbitkan yaitu SPM GU 12 buah, SPM LS 77 buah, SPM UP 1 buah dan SPM Nihil 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 35. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD	1. Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1930 dokumen	2357 Dokumen	122,12
		2. Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	60 Dokumen	91 Dokumen	151,67

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, realisasi indikator kinerja jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan mencapai 122,12% dari target yaitu 2.357 dokumen. Sedangkan jumlah dokumen SPMU yang diterbitkan mencapai 151,67% dari target yaitu 91 dokumen.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan tahun 2021 sebanyak 2.357 dokumen atau meningkat sebanyak 264 dokumen dibandingkan tahun 2020 sebanyak 2.093 dokumen dengan persentase capaian 122,12%.

Peningkatan jumlah dokumen yang terverifikasi juga diikuti peningkatan jumlah dokumen SPMU yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 91 dokumen atau meningkat sebanyak 6 dokumen dibandingkan tahun 2020 sebanyak 85 dokumen dengan persentase capaian 151,67%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 36. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian %
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	1.930 dok	2.093 dok	1.930 dok	2.357 dok	122,12

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan dan jumlah dokumen SPMU yang diterbitkan pada tahun 2021 adalah merupakan capaian dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan perbendaharaan dan verifikasi dalam satu tahun anggaran untuk melaksanakan penatausahaan keuangan SKPD. Keseluruhan capaian realisasi meningkat dari target capaian yang ditetapkan.

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD mengampu 2 (dua) kegiatan dan 3 sub kegiatan. Adapun Jumlah Pagu kegiatan sebesar Rp. 29.879.262.966 .- (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah.-*) dengan realisasi sebesar Rp.26.569.658.853.- (*Dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah.-*) dengan persentase serapan keuangan sebesar 88,92%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	
		Rp.	%
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156	4.014.242.350	78,19
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040	17.366.600	88,55
<i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.725.661.770	22.538.049.903	91,15
JUMLAH	29.879.262.966	26.569.658.853	88,92

2.3 Kasubbag Akutansi dan Pelaporan

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran Strategis Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebanyak 2 sasaran dan 2 indikator kinerja. Indikator kinerja jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan dengan target sebanyak 7 laporan telah tercapai 100%. Adapun laporan yang dimaksud sebagai berikut:

- 1). Laporan Bulanan keuangan (Laporan Fungsional Bendahara)
- 2). Laporan Tahunan Keuangan
- 3). Laporan Catatan Laporan atas keuangan (CaLK)
- 4). Laporan semesteran / prognosis enam bulan
- 5). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- 6). Laporan Kinerja (LKj)
- 7). Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan

Untuk capaian indikator kinerja jumlah dokumen akutansi yang dilaksanakan dengan target 1.930 dokumen mencapai 2.357 dokumen (122,12%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7 Laporan	7 Laporan	100,00
2.	Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan	1.930 Dokumen	2357 Dokumen	122,12

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan terealisasi 7 laporan dari target 7 laporan dengan capaian persentase 100%. Sedangkan indikator kinerja jumlah dokumen akutansi yang dilaksanakan terealisasi sebanyak 2.357 dari target 1.930 dokumen dengan capaian persentase 122,12%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Capaian realisasi target indikator kinerja tahun 2020 dengan realisasi tahun 2021 adalah sama yaitu 7 laporan dengan capaian 100%. Dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD yang disusun merupakan standar laporan yang harus dibuat dalam satu tahun anggaran.

Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen akutansi yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 2.357 dokumen atau meningkat sebanyak 264 dokumen dibandingkan tahun 2020 sebanyak 2.093 dokumen dengan persentase capaian 122,12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 39. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian %
1.	Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100
2.	Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan	1.930 Dok	2.093 Dok	1.930 Dok	2357 Dok	122,12

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan dan jumlah dokumen akutansi yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah merupakan capaian dalam rangka melaksanakan seluruh

rangkaian kegiatan akuntansi dan pelaporan dalam satu tahun anggaran untuk melaksanakan penatausahaan keuangan SKPD.

Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan sebanyak 7 dokumen kinerja dan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja yang dilaksanakan ada yang bersifat laporan bulanan dan laporan tahunan.

Untuk meningkatkan kinerja SKPD, maka dilaksanakan rapat evaluasi kinerja dengan menyajikan data realisasi bulanan pada minggu pertama setiap bulannya. Melalui rapat evaluasi diperoleh permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan langkah-langkah persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi e-Monev yang dikelola oleh Bappeda. Data yang diperoleh adalah data capaian proses, realisasi kinerja dan realisasi output renja.

Proses akuntansi keuangan dilaksanakan oleh bagian keuangan melalui data entry ke aplikasi SIMDA. Jumlah dokumen akuntansi yang telah dilaksanakan meningkat realisasinya dari realisasi tahun 2019, hal ini sesuai dengan jumlah pagu anggaran 2021 lebih besar dari pagu anggaran 2020 dan 2019.

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian akuntansi dan pelaporan tahun 2021 mengampu 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan Dengan Jumlah Pagu Anggaran Rp.58.969.330.- (*Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah.-*). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 25.925.680 (*Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus*

Delapan Puluh Rupiah.-) dengan realisasi persentase keuangan sebesar 43,96 %.

Walaupun capaian keuangan sebesar 43,96% tetapi capaian fisik mencapai rata-rata 111,06%. Dari anggaran yang tersedia, dana konsumsi rapat internal tidak terserap dikarenakan adanya Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengatur biaya konsumsi rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainya atau masyarakat. Walaupun demikian rapat kerja penyusunan laporan kinerja dan keuangan SKPD tetap dilaksanakan.

Realisasi kegiatan/sub kegiatan sub bagian akutansi dan pelaporan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	
		Rp.	%
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740	8.449.500	47,44
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	26.140.190	11.270.530	43,12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600	2.379.600	40,18
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900	1.273.000	32,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300	1.233.850	44,01
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600	1.319.200	54,93
JUMLAH	58.969.330	25.925.680	43,96

3. Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis di bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD dengan 4 indikator kinerja dengan keseluruhan target indikator adalah 100%. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 untuk indikator persentase rapat yang difasilitasi 143,53% dari target 100%, persentase fasilitas pembahasan rancangan Perda 71,05% dari target 100%, persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi 100% dari target 100% dan persentase kegiatan reses yang dilaksanakan 100% dari target 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%	143,53%	143,53%
		2. Persentase fasilitas pembahasan rancangan Perda	100%	71,05%	71,05%
		3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%
		4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2021 adalah 2 indikator kinerja mencapai sesuai target 100% dan 1 indikator yang melampaui target yaitu indikator kinerja persentase rapat yang difasilitasi (143%) dan satu indikator persentase fasilitas pembahasan rancangan perda yang belum mencapai target yaitu sebesar 71,05%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi dibandingkan tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar dari 97% menjadi 143,53% pada tahun 2021.

Realisasi persentase pembahasan rancangan Perda mengalami penurunan realisasi dari 2019 sebanyak 127% menjadi 100% pada tahun 2020 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 71,05%.

Realisasi persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 200% dari target 100%. Walaupun realisasi tahun 2021 menurun dibandingkan realisasi tahun 2020, tetapi capaian realisasi tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan.

Realisasi persentase kegiatan reses yang dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sesuai dengan target kinerja yaitu mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase rapat yang difasilitasi	97%	97,25%	100%	143,53%	143,53%
		Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	127%	100%	100%	71,05%	71,05%
		Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	200%	100%	100%	100%
		Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2020 sebesar 97% menjadi 143,53% pada tahun 2021. Peningkatan sebesar 46,53% hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan rapat sesuai dengan jadwal .

Realisasi persentase pembahasan rancangan Perda mengalami penurunan realisasi dari 100% pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,05%. Realisasi persentase pembahasan Raperda terdiri dari persentase capaian jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi dan persentase capaian jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu. Penurunan capaian sebesar 28,95% hal ini dikarenakan capaian jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi hanya mencapai 8 perda dari 19 raperda yang ditargetkan. Ada beberapa Raperda berdasarkan pertimbangan Bapemperda menunda pembahasan hingga pengusul (SKPD) selesai melakukan perbaikan dan penyempurnaan naskah Akademik dan draf Raperdanya.

Realisasi persentase kegiatan reses yang dilaksanakan tahun 2021 sesuai dengan target kinerja yaitu mencapai 100%. Pelaksanaan reses anggota DPRD sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Februari, Juli dan Desember.

Realisasi persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi tahun 2021 menurun dibandingkan realisasi tahun 2020, tetapi capaian realisasi tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD (komisi I, Komisi II dan Komisi III) dalam hal ini berkaitan dengan stake holder dan instansi/SKPD terkait berupa laporan penanganan pasca banjir, evaluasi dan program kerja PDAM Tirta Dharma, progress kerja Dinas PUPRP tahun 2021, penyelesaian bidang tanah yang sudah diukur lewat program PTSL, Dengar pendapat HNSI kabupaten Tanah Laut dan dengar pendapat jalan menuju desa Tebing Siring.

4. Analisis Program Penunjang

Bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 mengampu 2 program 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan Jumlah pagu kegiatan Rp. 29.500.036.751.- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.024.641.212.- (*Dua Belas Milyar Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah.-*) dengan persentase realisasi keuangan 40,76%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	693.940.170	616.731.200	88,87
<i>Layanan Administrasi DPRD</i>			
Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	8.018.000,00	27,03
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	664.275.600,00	608.713.200,00	91,64
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.806.096.581	11.407.910.012	39,60
<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>			
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	463.233.593,00	47,87
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.732.659.090,00	1.882.728.913,00	27,96
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	18.848.150,00	89,33
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	777.384.261,00	252.329.100,00	32,46
<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>			
Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	7.969.200,00	99,30
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.061.800,00	99,64
Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.114.400,00	89,59
Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.091.800,00	98,20
Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.804.200,00	97,10
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.061.000,00	94,22
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>			
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	2.942.300,00	6,52
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	2.934.000,00	6,50

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	2.479.900,00	5,55
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	2.320.200,00	5,19
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	0,00	-
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.000,00	99,99
Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	0,00	-
Peningkatan Kapasitas DPRD			
Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00	500.000,00	14,17
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	3.515.000,00	2,26
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.505.100,00	99,18
Pelaksanaan Reses	1.411.121.310,00	634.113.100,00	44,94
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	426.000,00	44,34
Pembahasan Kerja Sama Daerah			
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0,00	0,00	-
Fasilitasi Tugas DPRD			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00	8.094.772.256,00	43,85
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	0,00	-
JUMLAH	29.500.036.751	12.024.641.212	40,76

3.1 Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan adalah melaksanakan fasilitasi pembahasan raperda dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 8 raperda dari target 19 raperda dengan capaian persentase 42,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda	Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi	19 Raperda	8 raperda	42,11%

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2021 sebesar 42,11% dengan jumlah raperda selesai dibahas sebesar 8 raperda. Ada 5 raperda yang belum selesai dibahas dan dilanjutkan pada tahun 2022.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi sejak tahun 2019 sebesar 14 raperda menurun menjadi 11 raperda pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi 8 raperda pada tahun 2021. Namun demikian terjadi peningkatan target dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 11 raperda menjadi 19 raperda.

Jumlah Raperda yang dibahas pada tahun 2021 mencapai 13 raperda, namun yang selesai bahas hanya 8 raperda dan 5 raperda belum selesai dibahas . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46. Realisasi capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitas Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan fasilitas pembahasan Raperda	Jumlah fasilitas pembahasan Raperda yang difasilitasi	14 raperda	11 raperda	19 Raperda	8 raperda	42,11%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/4/Kep./DPRD-TL./2021 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/30/Kep./DPRD-TL/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, jumlah Raperda Tahun 2021 adalah 19 (sembilan belas) Raperda.

Pengajuan Raperda diluar Propemperda Tahun 2021 sebanyak 2 raperda oleh Bupati dalam surat nomor 188.342/282/KUM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan nomor 188.342/2970/KUM/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 mengajukan Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Berdasarkan Pasal 239 ayat (7) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda “ karena alasan adanya urgensi atas suatu raperda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan perda ditetapkan mengingat

hal tersebut merupakan perihal yang mendesak dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah berupa pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan yang sekarang diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

Raperda Eksekutif yang telah dibahas oleh Bapemperda tahun 2021 berjumlah 13 Raperda dan Raperda inisiatif DPRD sebanyak 3 buah Raperda. Raperda inisiatif yang belum dibahas (2 raperda) dimasukan kedalam Propemperda Tahun 2022. Secara keseluruhan Raperda selesai bahas sebanyak 8 raperda dan yang belum selesai bahas 5 raperda.

Adapun raperda yang selesai dibahas tahun 2021 sebanyak 8 Raperda yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- g. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Raperda tentang Desa Wisata.

Adapun raperda yang belum selesai dibahas tahun 2021 sebanyak 5 Raperda yaitu:

- a. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman;
- d. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- e. Raperda tentang Perubahan Bentuk badan Hukum PDAM Kabupaten Tanah Laut menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Mengingat sejumlah Raperda yang belum selesai dibahas atau belum dibahas maka terhadap raperda tersebut pembahasan oleh Panitia Khusus akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2022. Agar pembahasan raperda ditahun berikutnya (2022) dapat segera dibahas oleh Panitia Khusus sehingga dapat memaksimalkan waktu pembahasan mengingat banyaknya Raperda Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Propemperda tahun 2022 berjumlah 29 raperda yang meliputi Tindak lanjut UU Cipta Kerja, Proses tahun 2021, Raperda Tahun 2022, Raperda Inisiatif DPRD dan Raperda Kumulatif Terbuka.

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut mengampu 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.498.837.751 (*Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.617.139.756 (*Dua Milyar enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah.-*) dengan persentase 30,79%.

Anggaran terbesar yang tidak terserap adalah biaya yang dianggarkan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi serta kunjungan kerja Bapemperda . Hal ini lebih disebabkan kondisi pandemi COVID 19 yang melakukan pembatasan mobilisasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.498.837.751	2.617.139.756	30,79
<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>			
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	463.233.593,00	47,87
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.732.659.090,00	1.882.728.913,00	27,96
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	18.848.150,00	89,33
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	777.384.261,00	252.329.100,00	32,46
<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>			
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0,00	0,00	-

3.2 Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah melaksanakan fasilitasi hering dan penyerapan aspirasi dan melaksanakan layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dengan 4 jumlah indikator kinerja. Realisasi indikator kinerja keseluruhan mencapai target dan ada yang melebihi target bahkan sampai 5 kali lipat.

Realisasi jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi mencapai 21 kali dari target 4 kali dengan persentase capaian 525%. Realisasi jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan mencapai 3 kali dari target 3 kali dengan persentase capaian 100%. Realisasi jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu berjumlah 3 dokumen dari target 3 dokumen dengan persentase capaian 100% dan realisasi jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi berjumlah 6 dokumen dari target 6 dokumen dengan persentase capaian 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan fasilitasi hearing dan penyerapan aspirasi	1. Jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	4 kali	21 kali	525%
		2. Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	100%
2.	melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	1. Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	3 dok	3 dok	100%
		2. jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	6 dok	6 dok	100%

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2021 , 3 indikator kinerja yang mencapai sesuai target (100%) yaitu 1). realisasi jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan mencapai 3 kali dari target 3 kali dengan persentase capaian 100%, 2). realisasi jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu berjumlah 3 dokumen dari target 3 dokumen dengan persentase capaian 100%, 3). realisasi jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi berjumlah 6 dokumen dari target 6 dokumen.

dengan persentase capaian 100% dan 1 indikator kinerja melebihi target yaitu realisasi jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi mencapai 21 kali dari target 4 kali dengan persentase capaian 525%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi tahun 2019 dan 2020 tetap tidak menurun/naik. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 17 kali.

Realisasi jumlah kegiatan reses anggota DPRD meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang hanya 2 kali. Sedangkan realisasi tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 3 kali dengan capaian persentase target 100%.

Realisasi jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetap 3 dokumen dari target 3 dokumen dengan persentase capaian 100%, kegiatan fasilitasi ini bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan dan bersifat kumulatif terbuka.

Realisasi jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 dari 4 dokumen menjadi 12 dokumen, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 6 dokumen. Penurunan persentase capaian tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 juga mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan fasilitasi hearing dan penyerapan aspirasi	Jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	4 kali	4 kali	4 kali	21 kali	525%
		Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%
2.	melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
		jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	4 dok	12 dok	6 dok	6 dok	100%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi selama tahun 2021 sebanyak 21 kali dalam bentuk rapat dengar pendapat umum dan rapat kerja. Adapun hearing/dialog yang difasilitasi sebagai berikut:

- a) Rapat dengar pendapat umum komisi I dengan warga masyarakat, PTPN XIII, ATR/BPN, BPKAD, Badan Kesbangpol, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut membahas sengketa tanah/lahan HGU PTPN XIII Pelaihari yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021;
- b) Rapat kerja Komisi II dengan dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut membahas masalah keberadaan dan pembinaan Karang Taruna di Kabupaten Tanah Laut dan perencanaan

- pelaksanaan bantuan social terencana yang dilaksanakan pada tanggal 5 januari 2021;
- c) Rapat Kerja Komisi III dengan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut membahas rencana pembangunan RTH Pasar Lama yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021;
 - d) Rapat dengar pendapat umum komisi II dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2021;
 - e) Rapat Kerja Komisi III dengan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut membahas tentang antisipasi dan infrastruktur pasca banjir yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021
 - f) Rapat kerja komisi II dengan BPBD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Sosial membahas laporan Penanganan Pasca Bencana Banjir yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021;
 - g) Rapat dengar pendapat umum komisi II dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021;
 - h) Rapat Kerja Komisi II dengan Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Laut, RSUD H. Boejasin Pelaihari dan BPJS Kesehatan membahas Progres Universal health Coverage (UHC) serta penanganan dan pelayanannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 maret 2021;
 - i) Rapat Kerja Komisi III dengan Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian serta Bappeda Kabupaten Tanah Laut membahas ketenagakerjaan dan progress sekenario kawasan industry Jorong yang dilaksanakan pada tanggal 8 maret 2021;
 - j) Rapat kerja Komisi III dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut serta pedagang

Pasar membahas penataan kelolaan pasar pelaihari yang dilaksanakan pada tanggal 22 juni 2021;

- k) Rapat kerja Komisi I dengan Asisten I, DPRKLH dan warga Desa Sumber Jaya kecamatan Kintap membahas pencemaran lingkungan perkebunan warga desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021;
- l) Rapat dengan pendapat umum Komisi III dengan masyarakat Desa Lianganggang Kecamatan Bati Bati yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021;
- m) Rapat dengar pendapat umum komisi II dengan Badan Pengelola Masjid Besar Al-Manar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021;
- n) Rapat kerja Komisi II dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut beserta UPT membahas pencegahan dan penanggulangan pandemic Covid 19 di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021;
- o) Rapat dengar pendapat umum komisi III dan Komisi I dengan pedagang Pasar Tapandang Berseri Pelaihari yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021;
- p) Rapat dengar pendapat umum komisi II dengan BEM Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 22 September 2021;
- q) Rapat kerja komisi II dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan materi Peningkatan Fasilitas Objek Wisata di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021;
- r) Rapat kerja komisi III dengan dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut membahas penataan pasar yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021;

- s) Rapat dengar pendapat umum Komisi I dengan Masyarakat Desa Simpang 4 Sungai Baru Kecamatan Jorong yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021;
- t) Rapat dengar pendapat umum komisi II dengan Himpunan Nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021; dan
- u) Rapat dengar pendapat umum komisi III dengan SKPD, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat terkait usulan/pembukaan dan pemberian nama RTH pasar lama yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021.

Meningkatnya fasilitasi jumlah dialog/hearing oleh DPRD adalah upaya DPRD untuk meningkatkan tupoksi melalui dengar pendapat bersama masyarakat Kabupten tanah Laut untuk menjaring aspirasi, masukan dan informasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Upaya kedepannya agar kegiatan haering/dialog lebih diupayakan lagi dalam menjaring masukan seluruh jaringan aspirasi masyarakat yang komprehensif dan membawa Kabupaten Tanah Laut menjadi lebih baik lagi.

Jumlah kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 3 kali yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan selama 2 hari. Adapun pelaksanaan kegiatan Reses anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal 20-21 Februari 2021, tanggal 17-18 Juli 2021 dan 4-5 Desember 2021.

Fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD, Fasilitasi Pembahasan ancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tercapai sesuai target. Karena kegiatan ini bersifat rutin dan kumulatif terbuka serta harus dilaksanakan selama tahun berjalan.

Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi telah dilaksanakan dalam rapat kerja DPRD yang dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- a) Rapat kerja komisi II dengan BPBD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Sosial membahas laporan Penanganan Pasca Bencana Banjir yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021. Objek pengawasan berada dalam wilayah Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Pelaihari, Takisung dan Bati Bati;
- b) Rapat kerja Komisi III dengan PDAM Tirta Dharma Pelaihari dengan materi Evaluasi dan Program Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2021. Objek pengawasan berada dalam wilayah Kecamatan Bati Bati, Pelaihari, Bajuin dan Takisung;
- c) Rapat Kerja Komisi III dengan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut membahas Progres Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021. Objek pengawasan berada dalam wilayah kecamatan Tambang Ulang, Panyipatan, Batu Ampar, Kurau, Takisung, Bajuin, Pelaihari, Kintap, Jorong, Bati Bati dan Bumi Makmur;
- d) Rapat Kerja Komisi I dengan Asisten I Setda, Dinas PUPRP dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tanah Laut membahas Penyelesaian Bidang Tanah yang sudah diukur lewat program PTSL di desa Mekar sari Kecamatan Kintap yang dilaksanakan pada tanggal 20 mei 2021. Objek pengawasan berada dalam wilayah Kecamatan Kintap;
- e) Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021. Objek Pengawasan berada dalam wilayah Kecamatan Kintap; dan
- f) Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dengan PTPN XIII Pelaihari, Masyarakat Desa Tebing Siring, ATR/BPN, Dinas

PUPRP dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut membahas Jalan menuju Desa Tebing Siring yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021. Objek Pengawasan berada dalam wilayah Kecamatan Pelaihari.

Dari rapat kerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi I, Komisi II dan Komisi III sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah dilaksanakan pengawasan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Untuk kedepannya diupayakan pengawasan dapat ditingkatkan sebagai upaya dalam melaksanakan tupoksi DPRD.

Dari keseluruhan uraian realisasi indikator kinerja, sub bagian fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD adalah bersifat memfasilitasi dalam hal pelaksanaan fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Analisis Program Penunjang

sub bagian fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD pada tahun 2021 mengampu 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Adapun jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.841.550.510 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Lima Ratus Sepuluh Rupiah.-*) dengan realisasi sebesar Rp. 695.498.000.- (*Enam ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah.-*) dengan persentase capaian 37,77%.

Realisasi terendah ada pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah. Sub belanja perjalanan dinas dalam daerah merupakan komponen belanja terbesar dalam kegiatan tersebut yang tidak terealisasi. Walaupun realisasi keuangan rendah

tetapi dalam pelaksanaan kegiatan terlaksana dan memenuhi target sebagaimana telah diuraikan pada point 3 analisis diatas.

Anggaran kegiatan Reses dianggarkan 3 kali dengan 2 titik kegiatan untuk 2 hari pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan memang terlaksana 3 kali, namun tidak semua anggota DPRD melaksanakan di dua titik. Sehingga realisasi belanja tidak mencapai pagu maksimal. Untuk lebih jelasnya realisasi belanja kegiatan dan sub kegiatan bisa di lihat pada tabel berikut:

Tabel 50. Realisasi Kegiatan/sub kegiatan Kinerja Kasubbag Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.841.550.510	695.498.000	37,77
<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>			
Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	7.969.200,00	99,30
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.061.800,00	99,64
Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.114.400,00	89,59
Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.091.800,00	98,20
Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.804.200,00	97,10
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.061.000,00	94,22
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>			
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	2.942.300,00	6,52
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	2.934.000,00	6,50
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	2.479.900,00	5,55
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	2.320.200,00	5,19
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	0,00	-
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.000,00	99,99
Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	0,00	-
<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>			
Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	3.515.000,00	2,26
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.505.100,00	99,18
Pelaksanaan Reses	1.411.121.310,00	634.113.100,00	44,94
<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>			
Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	426.000,00	44,34

3.3 Kasubbag Fasilitas Persidangan dan Risalah

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis sub bagian fasilitas persidangan dan risalah adalah melaksanakan fasilitas rapat-rapat DPRD dan melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Ada dua indikator kinerja yaitu jumlah rapat yang difasilitasi dengan capaian realisasi 366 kali dari target 255 rapat dengan persentase capaian 143,53% dan indikator kinerja jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan mencapai 1.167 kali dengan target 1.347 kali dengan realisasi persentase capaian 86,64%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitas Persidangan Dan Risalah DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan fasilitas rapat-rapat DPRD	1. Jumlah Rapat yang difasilitasi	255 rapat	366 rapat	143,53%
2.	Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2. Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan	1.347 kali	1167 kali	86,64%

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas jumlah realisasi lrapat yang difasilitasi melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 43,53% atau 111 rapat. Sedangkan jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan tidak memenuhi target. Realisasi minus 180 kali (13,36%).

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Jumlah rapat yang difasilitasi meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Peningkatan realisasi tahun 2020 ke 2021 adalah 118 rapat. Sedangkan jumlah pelayanan

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan menurun. Hal ini terlihat pada realisasi 2019 sebesar 1.731 kali turun pada tahun 2020 menjadi 1.321 kali, dan masih turun kembali pada realisasi 2021 sebesar 1.167 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Fasilitas Persidangan Dan Risalah DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat DPRD	Jumlah Rapat yang difasilitasi	208 kali	248 kali	255 rapat	366 kali	143,53%
2.	Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	1.731 kali	1.321 kali	1.347 kali	1167 kali	86,64%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2020 sebesar 97% menjadi 143,53% pada tahun 2021. Berdasarkan rekapitulasi rapat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dari bagian fasilitasi persidangan dan risalah ada 13 jenis rapat yang diselenggarakan pada tahun persidangan kedua di masa persidangan kedua (2020-2021) dan masa persidangan ketiga ditambah tahun persidangan ketiga (2021-2022) masa persidangan pertama diperoleh total 336 jenis rapat. Adapun jenis dan jumlah rapat yang difasilitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53. Rekapitulasi rapat DPRD kabupaten tanah Laut Tahun 2021

No.	Jenis Rapat	Tahun Persidangan Ke dua		Tahun Persidangan Ke tiga	JUMLAH
		(2020-2021)		(2021-2022)	
		Masa Persidangan Kedua	Masa Persidangan Ketiga	Masa Persidangan Pertama	
1	Rapat Paripurna	10	16	36	62
2	Rapat Pimpinan DPRD	0	0	0	0
3	Rapat Konsultasi	0	2	5	7
4	Rapat badan Musyawarah	7	8	7	22
5	Rapat Komisi	4	3	0	7
6	Rapat Gabungan Komisi	1	4	3	8
7	Rapat Badan anggaran	1	3	7	11
8	Rapat Badan Pembentukan Perda	3	6	3	12
9	Rapat Badan Kehormatan	0	2	0	2
10	Rapat Panitia Khusus	5	6	8	19
11	Rapat Kerja	47	63	58	168
12	rapat Dengar Pendapat	0	0	0	0
13	Rapat Dengar Pendapat Umum	4	6	8	18
JUMLAH		82	119	135	336

Mengingat padatnya kegiatan dan agenda kerja anggota DPRD, ada rapat yang dijadwalkan tidak terlaksana akibat tidak kourum sehingga dijadwal ulang kembali serta menyesuaikan agenda kerja anggota Dewan.

jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka melaksanakan perjalanan Dinas , baik konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja DPRD. Berdasarkan rekapitulasi perjalanan dinas yang difasilitasi ada 224 kegiatan dengan jumlah pelaksana kegiatan 1.167 kali. Menurunnya jumlah realisasi sedikit banyaknya dipengaruhi pembatasan mobiltas masyarakat akibat pandemi Covid 19 dan padatnya kegiatan anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan Perjalanan Dinas sangat penting untuk penyajian informasi pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang transparan, cepat, dan akurat dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengelolaan saat ini masih bersifat manual baik dalam pembuatan nota dinas, SPT dan SPPD masih menggunakan Microsoft Office (microsoft excel) dan masih kesulitan dalam mencari data anggota dan pegawai yang berangkat serta berapa banyak biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Sehingga sering terjadi kesalahan – kesalahan dan kurang efisien dalam penyusunan laporan – laporannya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka sangat diperlukan sebuah sistem informasi difungsikan sebagai media pengolahan data perjalanan dinas. Seperti media yang berbasis komputer dan terprogram.

4. Analisis Program Penunjang

sub bagian fasilitasi persidangan dan risalah mengampu 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dari 2 program dengan jumlah pagu anggaran Rp.19.159.648.490.- (*Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan juta enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah.-*). Adapun realisasi belanja Rp.8.712.003.456.- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah.-*) dengan persentase capaian keuangan 45,47%.

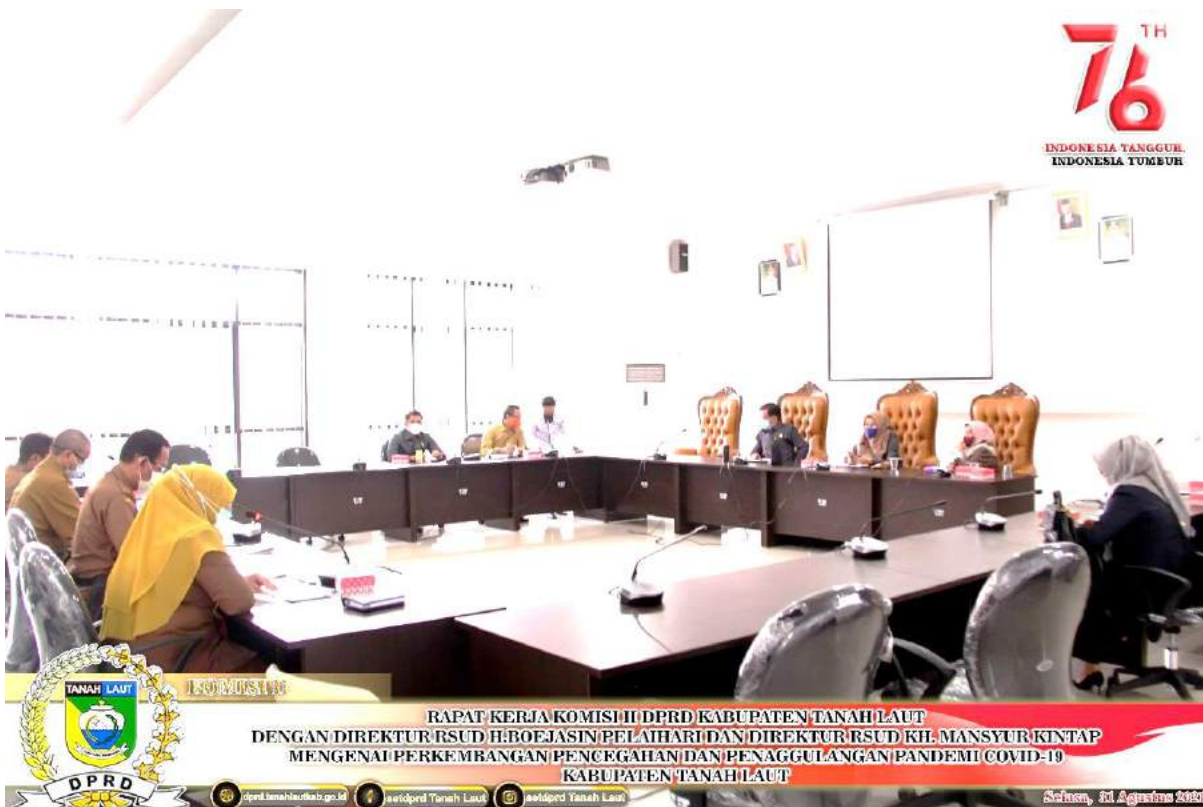
Realisasi keuangan paling rendah dan penyumbang sisa anggaran paling besar ada pada sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD mencapai Rp.10.366.048.144 atau 54,53% dari pagu anggaran. Selain pembatasan mobilitas masyarakat akibat Covid 19, rendahnya serapan juga dipengaruhi turunnya standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 33

tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bila dibandingkan standar biaya perjalanan dinas pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya program/kegiatan/sub kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	693.940.170	616.731.200	88,87
<i>Layanan Administrasi DPRD</i>			
Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	8.018.000,00	27,03
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	664.275.600,00	608.713.200,00	91,64
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.465.708.320	8.095.272.256	43,84
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>			
Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00	500.000,00	14,17
<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00	8.094.772.256,00	43,85
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	0,00	-
JUMLAH	19.159.648.490	8.712.003.456	45,47









B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni tahun 2021 sebesar Rp. 69.023.411.970,- .. Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui DPA-P 2021 menjadi Rp. 69.248.368.264,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 45.174.057.250,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 65,23 % dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 24.074.311.014,- (34,77%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 55. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PAGU MURNI 2021	PAGU PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	
				Rp.	(%)
1.	BELANJA DAERAH	69.023.411.970,00	69.248.368.264,00	45.174.057.250,00	65,23
A.	BELANJA OPERASI	68.032.431.770,00	67.119.078.965,00	43.597.629.525,00	64,96
	Belanja Pegawai	30.919.341.376,00	29.859.650.926,00	26.552.292.253,00	88,92
	Belanja Barang dan Jasa	37.113.090.394,00	37.259.428.039,00	17.045.337.272,00	45,75
B.	BELANJA MODAL	990.980.200,00	2.129.289.299,00	1.576.427.725,00	74,04
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.791.200,00	1.633.980.299,00	1.136.061.725,00	69,53
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.189.000,00	495.309.000,00	440.366.000,00	88,91

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 2 Program, 17 Kegiatan dan 68 sub kegiatan. Dari 68 sub kegiatan yang ada, 5 sub kegiatan yang tidak ada realisasi belanja. Hal ini disebabkan 2 sub kegiatan yang pagu belanja sub kegiatan di nihilkan pada saat Perubahan Anggaran 2021 dan 3 sub kegiatan tidak ada realisasi belanja namun kegiatan tetap

dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan pada pos belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 56. Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja berdasarkan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
			FISIK	FISIK TTB (%)	% KEUANGAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.934.008.543	32.123.450.796		53,19	86,98	4.810.557.747
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540,00	8.525.400,00	100,00	0,02	53,05	7.545.140,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800,00	4.390.900,00	100,00	0,02	36,24	7.725.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850,00	13.867.400,00	100,00	0,06	35,20	25.532.450,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110,00	8.475.600,00	100,00	0,02	53,33	7.417.510,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660,00	2.548.500,00	100,00	0,02	23,50	8.294.160,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740,00	8.449.500,00	100,00	0,03	47,44	9.361.240,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156	4.014.242.350	100,00	7,44	78,19	1.119.746.806
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	619.970.160,00	100,00	1,02	88,35	81.764.414,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040,00	17.366.600,00	100,00	0,03	88,55	2.245.440,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190,00	11.270.530,00	100,00	0,04	43,12	14.869.660,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600,00	2.379.600,00	100,00	0,01	40,18	3.543.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900,00	1.273.000,00	100,00	0,01	32,72	2.617.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300,00	1.233.850,00	100,00	0,00	44,01	1.569.450,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600,00	1.319.200,00	100,00	0,00	54,93	1.082.400,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	28.900.000,00	100,00	0,04	98,38	476.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	83.599.377,00	70,00	0,15	55,00	68.400.623,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.315.570,00	29.535.600,00	100,00	0,05	94,32	1.779.970,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.577.444,00	41.657.300,00	100,00	0,07	91,40	3.920.144,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.840,00	20.373.400,00	95,00	0,04	62,46	12.246.440,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.471.375.000	1.397.261.446	98,00	2,09	94,96	74.113.554,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
			FISIK	FISIK TTB (%)	% KEUANGAN	
Pengadaan Mebel	301.231.280,00	216.785.000,00	100,00	0,44	71,97	84.446.280,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.472.428.939,00	1.036.269.525,00	95,00	2,03	70,38	436.159.414,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00	0,01	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.834.200,00	230.332.854,00	100,00	0,38	86,97	34.501.346,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.185.670,00	21.411.500,00	98,33	0,04	78,76	5.774.170,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.235.000,00	180.880.000,00	98,00	0,28	90,79	18.355.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.292.400,00	217.844.350,00	100,00	0,68	46,62	249.448.050,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.400.000,00	49.576.051,00	87,50	0,12	54,24	41.823.949,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.730.000,00	35.786.500,00	100,00	0,05	94,85	1.943.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.282.200,00	9.504.000,00	45,00	0,02	27,72	24.778.200,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	261.785.000,00	215.274.000,00	90,00	0,34	82,23	46.511.000,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.725.661.770	22.538.049.903	100,00	35,82	91,15	2.187.611.867
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	511.720.000,00	388.438.000,00	100,00	0,74	75,91	123.282.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	45.538.200,00	100,00	0,10	65,05	24.461.800,00
Layanan Administrasi DPRD						
Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	8.018.000,00	80,00	0,03	27,03	21.646.570,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	664.275.600,00	608.713.200,00	100,00	0,96	91,64	55.562.400,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.314.359.721	13.050.606.454		37,78	40,39	19.263.753.267
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	463.233.593,00	80,00	1,12	47,87	504.460.957,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.732.659.090	1.882.728.913	80,00	7,80	27,96	4.849.930.177
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	18.848.150,00	100,00	0,03	89,33	2.251.700,00
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	777.384.261,00	252.329.100,00	100,00	1,13	32,46	525.055.161,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran						
Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	7.969.200,00	100,00	0,01	99,30	56.200,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.061.800,00	100,00	0,01	99,64	21.700,00
Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.114.400,00	100,00	0,01	89,59	710.800,00
Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.091.800,00	100,00	0,01	98,20	111.800,00
Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.804.200,00	100,00	0,00	97,10	53.900,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.061.000,00	100,00	0,01	94,22	555.900,00

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
			FISIK	FISIK TTB (%)	% KEUANGAN	
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>						
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	2.942.300,00	66,70	0,04	6,52	42.195.400,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	2.934.000,00	66,67	0,04	6,50	42.238.800,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	2.479.900,00	66,67	0,04	5,55	42.223.000,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	2.320.200,00	66,67	0,04	5,19	42.382.700,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	0,00	-	-	-	44.702.900,00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.000,00	100,00	0,00	99,99	400,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	0,00	-	-	-	1.377.500,00
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>						
Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360	480.162.487,00	71,50	1,90	26,18	1.354.127.873,
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	567.723.500,00	452.780.500,00	90,00	0,74	79,75	114.943.000,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	252.174.300,00	80,00	0,58	50,82	244.075.200,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	219.670.755,00	80,00	0,35	73,31	79.966.915,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00	152.721.400,00	100,00	0,24	90,92	15.242.990,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00	500.000,00	100,00	0,01	14,17	3.027.920,00
<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>						
Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	3.515.000,00	5,00	0,01	2,26	151.825.000,00
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.505.100,00	100,00	0,01	99,18	53.600,00
Pelaksanaan Reses	1.411.121.310,00	634.113.100,00	100,00	2,04	44,94	777.008.210,00
<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>						
Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	426.000,00	100,00	0,00	44,34	534.700,00
<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>						
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00	85.187.000,00	90,00	0,19	59,82	57.210.720,00
<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>						
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400	8.094.772.256	80,00	21,40	43,85	10.366.048.144
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	0,00	-	-	-	1.360.000,00
JUMLAH	69.248.368.264	45.174.057.250		90,97	65,23	24.074.311.014

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar Rp. 67.119.078.965 terealisasi belanja sebesar Rp. 43.597.629.525 dengan capaian persentase keuangan 64,96%.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.26.552.292.253.- dengan rincian Belanja gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 4.014.242.350.- dan belanja gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 22.538.049.903.- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156	4.014.242.350	1.119.746.806	78,19
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.725.661.770	22.538.049.903	2.187.611.867	91,15
Jumlah	29.859.650.926	26.552.292.253	3.307.358.673	88,92

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 17.045.337.272.- atau 45,75 % dari pagu anggaran tahun 2021 Rp. 37.259.428.039. dengan sisa anggaran Rp. 24.804.516.411 atau 54,25 % dari pagu. Adapun Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2021 secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 58. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
Belanja Barang Pakai Habis	3.345.798.944,00	2.305.898.080,00	1.039.900.864,00	68,92
Belanja Jasa Kantor	2.609.384.200,00	2.025.161.554,00	584.222.646,00	77,61
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53.734.574,00	3.170.160,00	50.564.414,00	5,90
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	143.017.000,00	41.574.000,00	101.443.000,00	29,07
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	263.900.000,00	83.934.000,00	179.966.000,00	31,81
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	800.000.000,00	346.500.000,00	453.500.000,00	43,31
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384.295.000,00	184.090.651,00	200.204.349,00	47,90
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.612.200,00	45.290.500,00	4.321.700,00	91,29
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.950.000,00	1.379.000,00	12.571.000,00	9,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.595.736.121,00	12.008.339.327,00	17.587.396.794,00	40,57
Jumlah	37.259.428.039	17.045.337.272	20.214.090.767	45,75

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.136.061.725.- atau 69,53% dari pagu Rp. 1.633.980.299.-. Dengan jenis belanja pengadaan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Belanja Modal Alat Ukur, Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Belanja Modal Alat Komunikasi, Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah, Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
Belanja Modal Alat Angkutan	4.000.000,00	3.950.000,00	50.000,00	98,75
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.912.500,00	43.000.000,00	6.912.500,00	86,15
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	617.362.979,00	508.298.725,00	109.064.254,00	82,33
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	773.363.500,00	451.513.000,00	321.850.500,00	58,38
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	0,00
Belanja Modal Komputer	186.745.320,00	129.300.000,00	57.445.320,00	69,24
Jumlah	1.633.980.299	1.136.061.725	497.918.574	69,53

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yaitu pengadaan bangunan gedung tempat kerja pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 440.366.000.- atau 88,91% dari pagu Rp. 495.309.000. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 60. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	495.309.000,00	440.366.000,00	54.943.000,00	88,91
Jumlah	495.309.000	440.366.000	54.943.000	88,91

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp.8.837.690.647 dengan realisasi Rp. 5.825.335.805 dengan persentase capaian keuangan 65,91% dan realisasi fisik 152,2% yang diperhitungkan dari rerata realisasi indikator kinerja pengampu.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD dengan anggaran Rp. 878.085.610.- dengan realisasi Rp.690.688.900.- dengan persentase capaian keuangan 78,66 % dan realisasi fisik 146,6 % yang diperhitungkan dari rerata realisasi indikator kinerja pengampu.

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan dengan anggaran Rp. 30.032.555.256.- dengan realisasi Rp. 26.633.392.333.- dengan persentase capaian keuangan 88,68 % dan realisasi fisik 100 % yang diperhitungkan dari realisasi indikator kinerja.

Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD dengan anggaran Rp. 29.500.036.751.- dengan realisasi Rp. 12.024.641.212.- dengan persentase capaian keuangan 40,76 % dan realisasi fisik 85,88 % yang diperhitungkan dari rerata realisasi indikator kinerja pengampu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 61. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis /program penunjang	REALISASI			
		Anggaran (Rp)	Rp.	% Keuangan	% Fisik
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	8.837.690.647	5.825.334.805	65,91	152,2
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.837.690.647	5.825.334.805	65,91	152,2
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	878.085.610	690.688.900	78,66	146,6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	878.085.610	690.688.900	78,66	146,6
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	30.032.555.256	26.633.392.333	88,68	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.032.555.256	26.633.392.333	88,68	100
4.	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	29.500.036.751	12.024.641.212	40,76	85,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	693.940.170	616.731.200	88,87	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.806.096.581	11.407.910.012	39,60	
JUMLAH		129.659.045.881	84.522.779.695	65,19	121,17

3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021

Pada tahun 2020 terdapat 5 program dan 18 kegiatan sementara pada tahun 2021 menjadi 2 program, 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Realisasi belanja pada tahun 2020 sebesar Rp.48.310.095.583.- dengan pagu anggaran Rp.67.085.251.964.- (termasuk belanja tidak langsung DPRD). Sedangkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 69.248.368.264.- dengan realisasi belanja Rp. 45.174.057.250.- (65,23%).

Berdasarkan uraian tersebut diatas ; pagu dan jumlah realisasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan pagu dan realisasi tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2021

TAHUN 2020		TAHUN 2021	
Nama program	Kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran		a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD		b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasara a Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur		e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
	Kegiatan reses dan penyusunan pikir		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Fasilitasi rapat-rapat kegiatan DPRD		d Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD		e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Fasilitas Bimbingan Teknis DPRD		f Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

			g . Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD		h . Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Penyusunan laporan keuangan		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
	Penyelenggaraan administrasi perbendaharaan dan verifikasi		a . Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			b . Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Pengelolaan Informasi, Humas, Keprotokolan dan Perlengkapan DPRD	Pelayanan informasi, kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
			a . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			b . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			c . Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			d . Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			a . Pengadaan Mebel
			b . Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			a . Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			b . Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			c . Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			d . Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			a . Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			b . Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			c . Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			d . Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			e . Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>
			a . Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
			b . Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
			c . Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
			<i>Layanan Administrasi DPRD</i>
			a . Fasilitasi Fraksi DPRD
			b . Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>
			a . Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			b . Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			c . Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
			d . Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
			<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>
			a . Pembahasan KUA dan PPAS
			b . Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			c . Pembahasan APBD
			d . Pembahasan APBD Perubahan
			e . Pembahasan Laporan Semester
			f . Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
			<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>
			a . Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
			b . Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			c . Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

			d . Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
			e . Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
			f . Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
			g . Pengawasan Penggunaan Anggaran
			<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>
			a . Bimbingan Teknis DPRD
			b . Publikasi dan Dokumentasi Dewan
			c . Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			d . Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			e . Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			f . Penyusunan Program Kerja DPRD
			<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>
			a . Kunjungan Kerja dalam Daerah
			b . Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
			c . Pelaksanaan Reses
			<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>
			a . Pengawasan Kode Etik DPRD
			<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>
			a . Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
			b . Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
			<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>
			a . Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
			b . Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Total		Total	
5 Program	18 Kegiatan	2 Program	18 Kegiatan dan 68 sub kegiatan
Total Anggaran		Total Anggaran	
Rp. 67.085.251.964.-		Rp. 69.248.368.264.-	
Realisasi		Realisasi	
Rp. 48.310.095.583		Rp. 45.174.057.250.-	

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran Indikator kinerja utama yakni meningkatnya kinerja layanan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, dengan indikator utama tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dapat dicapai dengan nilai BAIK (77,70) dari target BAIK (77,09).

Dengan Laporan Kinerja (LKj) diharapkan dapat memperjelas atau memberi gambaran sampai sejauh mana program yang tertuang dalam Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja tahun 2021 telah dilaksanakan. Laporan ini dilaksanakan untuk evaluasi kegiatan dan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2020 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana;
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil

yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten;

5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai;
6. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada indikator indeks kepuasan;
7. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat DPRD dan pembahasan raperda.
8. Menyediakan tenaga ahli DPRD, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama tenaga ahli Fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, sehingga upaya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dapat tercapai.
9. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya manusia Sekretariat DPRD, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi terhadap bidang tugas baik DPRD maupun Sekretariat DPRD. Misalnya melalui kegiatan workshop, bimtek , seminar, lokakarya, kunjungan kerja, dll.

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD)	Sekretariat DPRD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPAJA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd


ALFRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 005
H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari
Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009 Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP : 19620622 198702 2 002
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.


Pelaihari,

2021

**PIHAK KEDUA
BUPATI TANAH LAUT**


H. SUKAMTA

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**


LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **SEKRETARIAT DPRD**
 Penanggungjawab : **Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut**
 Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Baik (77,09)	IKM

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.934.008.543,-	APBD-P
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.133.700,-	APBD-P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.896.494.360,-	APBD-P
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.376.000,-	APBD-P
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.580.887.854,-	APBD-P
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.773.660.219,-	APBD-P
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.644.870,-	APBD-P
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.489.600,-	APBD-P
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.307.381.770,-	APBD-P
9	Layanan Administrasi DPRD	693.940.170,-	APBD-P
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	32.314.359.721,-	APBD-P
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.498.837.751,-	APBD-P
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	38.612.700,-	APBD-P
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	228.957.100,-	APBD-P
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.369.393.340,-	APBD-P
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.573.020.010,-	APBD-P
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,-	APBD-P
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	142.397.720,-	APBD-P
8	Fasilitasi Tugas DPRD	18.462.180.400,-	APBD-P

Pelaihari,

2021

**PIHAK KEDUA
BUPATI TANAH LAUT**

H. SUKAMTA

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**

LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Luffiati Uyun, M.Pd
NIP : 19620622 198702 2 002
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut


Luffiati Uyun, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat


Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1 Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib 2 Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD 3 Persentasi pemenuhan layanan sarana dan prasarana 4 Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100 100 100 100	% % % %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	1 Persentasi kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya 2 Persentasi penyebaran Informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100 100	% %

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 701.734.574,00	APBD-P
2	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 29.376.000,00	APBD-P
2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 152.000.000,00	APBD-P
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 31.315.570,00	APBD-P
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.577.444,00	APBD-P
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 32.619.840,00	APBD-P
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.471.375.000,00	APBD-P
4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>		
4.1	Pengadaan Mebel	Rp 301.231.280,00	APBD-P
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.472.428.939,00	APBD-P
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.390.000,00	APBD-P
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 264.834.200,00	APBD-P
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 27.185.670,00	APBD-P
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 199.235.000,00	APBD-P
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 467.292.400,00	APBD-P
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 91.400.000,00	APBD-P
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 37.730.000,00	APBD-P
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 34.282.200,00	APBD-P
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 261.785.000,00	APBD-P
7	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		APBD-P
7.1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 511.720.000,00	APBD-P
7.2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 70.000.000,00	APBD-P
II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
1	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>		
1.1	Bimbingan Teknis DPRD	Rp 1.834.290.360,00	APBD-P
1.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 567.723.500,00	APBD-P
1.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 496.249.500,00	APBD-P
1.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 299.637.670,00	APBD-P
1.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 167.964.390,00	APBD-P
2	<i>Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>		
2.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp 142.397.720,00	APBD-P

JUMLAH Rp 9.715.776.257,00

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Lufriati Uyun, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Pelaihari, 11 November 2021
Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syalranl Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Norhayati, S.St.Pi
NIP : 19770502 200903 2 007
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Kasubbag Tata Usaha dan
Kepegawaian

Norhayati, S.St.Pi
NIP. 19770502 200903 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.568	Dokumen
2	Melaksanakan Fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	15	Orang
3	Melaksanakan Fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi	175	Orang
4	Melaksanakan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaan kesehatannya	35	Orang
5	Melaksanakan Fasilitas pemenuhan tenaga Ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5	Orang

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 701.734.574,00	APBD-P
2	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 29.376.000,00	APBD-P
2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 152.000.000,00	APBD-P
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
3.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 32.619.840,00	APBD-P
3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.471.375.000,00	APBD-P
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.390.000,00	APBD-P
4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 27.185.670,00	APBD-P
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 199.235.000,00	APBD-P
5	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		
5.1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 511.720.000,00	APBD-P
5.2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 70.000.000,00	APBD-P
II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
1	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>		
1.1	Bimbingan Teknis DPRD	Rp 1.834.290.360,00	APBD-P
1.2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 496.249.500,00	APBD-P
1.1	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 299.637.670,00	APBD-P

JUMLAH Rp 5.829.813.614,00

Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Nothayadi, S.St.Pi
NIP. 19710502 200903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Ahmad Yanuar, ST
NIP : 19660102 199303 1 008
Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

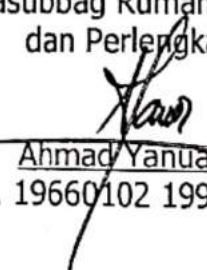
PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat


Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Kasubbag Rumah Tangga
dan Perlengkapan


Ahmad Yanuar, ST
NIP. 19660102 199303 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan 2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	45 7	Jenis Unit

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>		
<i>1</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 31.315.570,00	APBD-P
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.577.444,00	APBD-P
<i>2</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>		
2.1	Pengadaan Mebel	Rp 301.231.280,00	APBD-P
2.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.472.428.939,00	APBD-P
<i>3</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 264.834.200,00	APBD-P
<i>4</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 467.292.400,00	APBD-P
4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 91.400.000,00	APBD-P
4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 37.730.000,00	APBD-P
4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 34.282.200,00	APBD-P
4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 261.785.000,00	APBD-P

JUMLAH Rp 3.007.877.033,00

Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan,
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Ahmad Yanuar, ST
NIP. 19660102 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nove Noor Salam, SH
NIP : 19861123 201502 1 002
Jabatan : Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Kasubbag Hubungan Masyarakat,
Protokol dan Publikasi

Nove Noor Salam, SH
NIP. 19861123 201502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran**

**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
: 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Penyebarluasan Informasi / pemberitaan DPRD	Jumlah Pemberitaan DPRD yang diekspose	50	Kali
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kehumasan dan keprotokolan	1 Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	459	Kali
		2 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi	255	Kali

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1	Peningkatan Kapasitas DPRD		
1.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 567.723.500,00	APBD-P
1.2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 167.964.390,00	APBD-P
2	Pembahasan Kerja Sama Daerah		
2.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp 142.397.720,00	APBD-P

JUMLAH Rp 878.085.610,00

Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Nove Nock Salam, SH
NIP.19861123 201502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : H. M. Hayat, S.Sos
NIP : 19701013 199403 1 005
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Luffiati Uyun, M.Pd
NIP : 19620622 198702 2 002
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

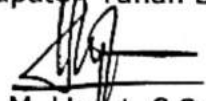
PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut


Luffiati Uyun, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut


H. M. Hayat, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kepala Bagian Keuangan
: 2021

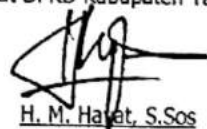
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>I</i>	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>		
<i>1</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.070.540,00	APBD-P
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 12.116.800,00	APBD-P
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 39.399.850,00	APBD-P
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 15.893.110,00	APBD-P
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 10.842.660,00	APBD-P
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 17.810.740,00	APBD-P
<i>2</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.133.989.156,00	APBD-P
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Rp 19.612.040,00	APBD-P
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 26.140.190,00	APBD-P
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.922.600,00	APBD-P
2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 3.890.900,00	APBD-P
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp 2.803.300,00	APBD-P
2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 2.401.600,00	APBD-P
<i>3</i>	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		
3.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 24.725.661.770,00	APBD-P
JUMLAH Rp 30.032.555.256,00			

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Luffiati Uyun, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Pelaihari, November 2021
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


H. M. Hayet, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Zikri Fahma, SE, M.A.P
NIP : 19750401 201001 1 010
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. M. Hayat, S.Sos
NIP : 19701013 199403 1 005
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Keuangan

H. M. Hayat, S.Sos

NIP. 19701013 199403 1 005

Pelaihari, November 2021

Kasubbag Perencanaan dan
Anggaran

Zikri Fahma, SE, M.A.P

NIP. 19750401 201001 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6	Dokumen

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.070.540,00	APBD-P
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 12.116.800,00	APBD-P
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 39.399.850,00	APBD-P
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 15.893.110,00	APBD-P
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 10.842.660,00	APBD-P

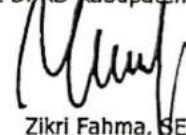
JUMLAH Rp 94.322.960,00

Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



H. M. Hayati S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



Zikri Fahma, SE
NIP. 19750401 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Bintarti, SE
NIP : 19730415 200701 2 024
Jabatan : Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. M. Hayat, S.Sos
NIP : 19701013 199403 1 005
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Keuangan

H. M. Hayat, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kasubbag Perbendaharaan dan
Verifikasi

Bintarti, SE
NIP. 19730415 200701 2 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

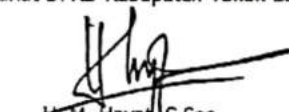
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
 Penanggungjawab : Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi
 Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1.930	Dokumen
		2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	60	Dokumen


NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>			
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.133.989.156,00	APBD-P
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Rp 19.612.040,00	APBD-P
2	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		
2.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 24.725.661.770,00	APBD-P

JUMLAH Rp 29.879.262.966,00

Kepala Bagian Keuangan
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


 H. M. Hayati, S.Sos
 NIP. 19701013 199403 1 005

Pelaihari, November 2021
 Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi,
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


 Bintarti, SE
 NIP. 19730415 200701 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sri Juana, S.Pi
NIP : 19800118 200501 2 016
Jabatan : Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. M. Hayat, S.Sos
NIP : 19701013 199403 1 005
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.


PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Keuangan


H. M. Hayat, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kasubbag Akuntansi dan
Pelaporan


Sri Juana, S.Pi
NIP. 19800118 200501 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran


: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7	Laporan
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	1.930	Dokumen

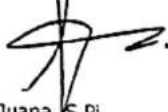
NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 17.810.740,00	APBD-P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 26.140.190,00	APBD-P
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.922.600,00	APBD-P
2.3	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 3.890.900,00	APBD-P
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp 2.803.300,00	APBD-P
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 2.401.600,00	APBD-P

JUMLAH Rp 58.969.330,00

Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


H. M. Hayat, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan,
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Sri Juana, S.Pi
NIP. 19800118 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Kaisar Muslim, SH
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Luffiati Uyun, M.Pd
NIP : 19620622 198702 2 002
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

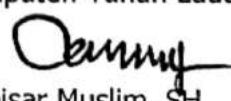
PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut


Luffiati Uyun, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan
Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut


Kaisar Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
: 2021


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1 Persentasi rapat yang difasilitasi	100	%
		2 Persentasi fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100	%
		3 Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100	%
		4 Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100	%

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Layanan Administrasi DPRD		
1.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 29.664.570,00	APBD-P
1.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 664.275.600,00	APBD-P
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 967.694.550,00	APBD-P
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 6.732.659.090,00	APBD-P
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 21.099.850,00	APBD-P
1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp 777.384.261,00	APBD-P
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 8.025.400,00	APBD-P
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 6.083.500,00	APBD-P
2.3	Pembahasan APBD	Rp 6.825.200,00	APBD-P
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 6.203.600,00	APBD-P
2.5	Pembahasan Laporan Semester	Rp 1.858.100,00	APBD-P
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 9.616.900,00	APBD-P
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 45.137.700,00	APBD-P
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 45.172.800,00	APBD-P
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 44.702.900,00	APBD-P
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 44.702.900,00	APBD-P
3.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp 44.702.900,00	APBD-P
3.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 3.160.400,00	APBD-P
3.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 1.377.500,00	APBD-P
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		
4.1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 3.527.920,00	APBD-P
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 155.340.000,00	APBD-P
5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 6.558.700,00	APBD-P
5.3	Pelaksanaan Reses	Rp 1.411.121.310,00	APBD-P
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 960.700,00	APBD-P
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		
7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Rp -	
8	Fasilitasi Tugas DPRD		
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 18.460.820.400,00	APBD-P
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp 1.360.000,00	APBD-P
JUMLAH		Rp 29.500.036.751,00	

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Luffiati Uyu, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Pelalhari, November 2021
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Kalsar Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gilang Pradana, S.STP
NIP : 19891025 201010 1 001
Jabatan : Kasubbag Fasilitasi Persidangan dan Risalah
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, SH
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

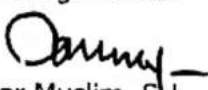
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

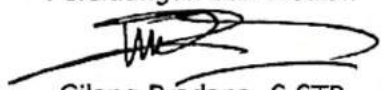
PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas
dan Fungsi DPRD


Kaisar Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Kasubbag Fasilitasi
Persidangan dan Risalah


Gilang Pradana, S.STP
NIP. 19891025 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran**


**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Fasilitas Tugas - Tugas DPRD
: 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Fasilitas rapat - rapat DPRD	Jumlah Rapat yang difasilitasi	255	Rapat
2	Melaksanakan pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan	1.347	Kali

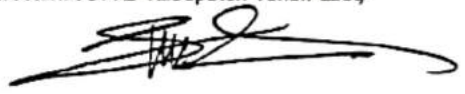
NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>I</i>	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>		
<i>1</i>	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>		
1.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 29.664.570,00	APBD-P
1.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 664.275.600,00	APBD-P
<i>II</i>	<i>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</i>		
<i>1</i>	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>		
1.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 18.460.820.400,00	APBD-P
1.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp 1.360.000,00	APBD-P
<i>2</i>	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>		
1.1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 3.527.920,00	APBD-P

JUMLAH Rp 19.159.648.490,00

Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Kaiser Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 004

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Fasilitas Persidangan dan Risalah
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Gilang Pradana, S.STP
NIP. 19891025 201010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Fahrian Nafarie, SH, MH
NIP : 19810116 201101 1 002
Jabatan : Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang – Undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, SH
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

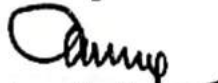
Selaku atasan Pihak: Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.


PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas
dan Fungsi DPRD


Kaisar Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Kasubbag Fasilitasi
Fasilitasi Kajian
Perundang – Undangan


Fahrian Nafarie, SH, MH
NIP. 19810116 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran**

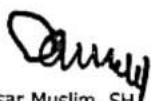
**: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang - Undangan
: 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Raperda	Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi	19	Raperda


NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 967.694.550,00	APBD-P
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 6.732.659.090,00	APBD-P
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 21.099.850,00	APBD-P
1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp 777.384.261,00	APBD-P
2	Pembahasan Kerja Sama Daerah		
2.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Rp -	

JUMLAH Rp 8.498.837.751,00

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Kaisar Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, November 2021
Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang - Undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Fahrian Nafarie, SH, MH
NIP. 19810116 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009

Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Adityawarman, SH
NIP : 19851026 201502 1 001
Jabatan : Kasubbag Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, SH
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, November 2021

Kepala Bagian Fasilitas Tugas
dan Fungsi DPRD

Kaisar Muslim, SH

NIP. 19671007 199803 1 004

Kasubbag Fasilitas Fungsi
Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Adityawarman, SH

NIP. 19851026 201502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

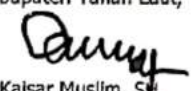
1 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
1 Kasubag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD
1 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi 2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan	4 3	Kali Kali
2	Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat waktu 2 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	3 6	dok dok

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran		
1.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 8.025.400,00	APBD-P
1.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 6.083.500,00	APBD-P
1.3	Pembahasan APBD	Rp 6.825.200,00	APBD-P
1.4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 6.203.600,00	APBD-P
1.5	Pembahasan Laporan Semester	Rp 1.858.100,00	APBD-P
1.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 9.616.900,00	APBD-P
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 45.137.700,00	APBD-P
2.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 45.172.800,00	APBD-P
2.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 44.702.900,00	APBD-P
2.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 44.702.900,00	APBD-P
2.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp 44.702.900,00	APBD-P
2.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 3.160.400,00	APBD-P
2.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 1.377.500,00	APBD-P
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
3.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 155.340.000,00	APBD-P
3.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 6.558.700,00	APBD-P
3.3	Pelaksanaan Reses	Rp 1.411.121.310,00	APBD-P
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
4.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 960.700,00	APBD-P


JUMLAH Rp 1.841.550.510,00

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan
Fungsi DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Kaiser Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, November 2021

bbag Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan D
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Adhyan, SH
NIP. 19851020 201502 1 001

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SASARAN
Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD
INDIKATOR
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Sasaran
1) Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian
2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD
Indikator
1) Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib
2) Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD
3) Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana
4) Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
1) Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya
2) Persentasi penyebaran informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
Sasaran
1) Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan
Indikator :
1) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

KEPALA BAGIAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Sasaran
1) Meningkatkan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD
Indikator
1) Persentasi Rapat yang difasilitasi
2) Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda
3) Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi
4) Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan

Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Kasubag Rumah tangga dan perlengkapan	Kasubag Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sasaran	Sasaran	Sasaran
1 Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	1 Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Melaksanakan Penyebarluasan informasi / pemberitaan DPRD
2 Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD		2 Melaksanakan Penyelenggaraan Kehumasan dan keprotokolan
3 Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD		
4 Melaksanakan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD		
5 Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan tenaga Ahli DPRD		
Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	1 Jumlah Pemberitaan DPRD yang diekspose
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	2 Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
3 Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi		3 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi
4 Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaan kesehatannya		
5 Jumlah tenaga ahli yang disediakan		

Kasubag Perencanaan dan Anggaran	Kasubag Perbendaharaan & Verifikasi	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan
Sasaran	Sasaran	Sasaran
1 Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan Anggaran SKPD	1 Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan
		2 Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD
Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan
	2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan

Kasubag Fasilitasi Tugas - tugas DPRD	Kasubag Fasilitasi Legislasi Daerah	Kasubag Fasilitasi penganggaran dan Pengawasan DPRD
Sasaran	Sasaran	Sasaran
1 Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1 Melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Raperda	1 Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi
2. Melaksanakan pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		2 Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD
Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah Rapat yang difasilitasi	1 Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi
2. Jumlah Pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan		2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan
		3 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat waktu
		4 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM - KEGIATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2021
SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target dan Realisasi Anggaran																Target dan Realisasi Kegiatan												APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)	Sisa Dana
				Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV									
				T		R		T		R		T		R		T		R		T	R	T	R	T	R	T	R								
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%	%								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																		
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.070.540	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.401.000	21,16%	0	0,00%	4.974.400	30,95%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	59%	100%	67%	100%	67%	16.070.540	16.070.540	0					
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.116.800	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.603.000	13,23%	0	0,00%	1.047.900	8,65%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	35%	100%	39%	100%	39%	12.116.800	12.116.800	0					
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			39.399.850	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.221.200	15,79%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	19%	100%	19%	39.399.850	39.399.850	0					
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.893.110	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.885.000	24,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	15.893.110	15.893.110	0					
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			10.842.660	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%		100%		100%		100%		10.842.660	10.842.660	0					
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			9.000.000	50,53%	0	0,00%	8.810.740	49,47%	2.764.300	15,52%	0	0,00%	2.923.200	16,41%	0	0,00%	0	0,00%	51%	0%	100%	50%	100%	75%	100%	75%	17.810.740	17.810.740	0					
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.494.180	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	7.494.180	0	(7.494.180)					
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																		
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.833.567.556	35,71%	1.097.190.260	21,37%	1.604.439.122	31,25%	888.372.115	17,30%	1.390.770.500	27,09%	911.098.307	17,75%	305.211.978	5,94%	0	0,00%	36%	25%	67%	50%	94%	75%	100%	75%	5.133.989.156	5.133.989.156	0					
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			175.433.644	25,00%	151.200.000	21,55%	175.433.644	25,00%	154.800.000	22,06%	175.433.644	25,00%	158.824.620	22,63%	175.433.642	25,00%	0	0,00%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	75%	701.734.574	701.734.574	0					
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			19.612.040	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.430.300	22,59%	0	0,00%	8.768.800	44,71%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	75%	100%	75%	19.612.040	19.612.040	0					
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			26.140.190	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.186.450	8,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	75%	100%	75%	26.140.190	26.140.190	0					
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.922.600	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	454.600	7,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	75%	100%	75%	5.922.600	5.922.600	0					
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.890.900	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	288.000	7,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	3.890.900	3.890.900	0					
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			2.803.300	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	159.250	5,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	2.803.300	2.803.300	0					
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.401.600	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	2.401.600	2.401.600	0					
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																		
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			29.376.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	28.900.000	98,38%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29.376.000	29.376.000	0					
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			38.000.000	25,00%	0	0,00%	38.000.000	25,00%	25.000.000	16,45%	76.000.000	50,00%	2.815.000	1,85%	0	0,00%	0	0,00%	25%	0%	50%	25%	100%	25%	100%	25%	152.000.000	152.000.000	0					
4.02.01.2.06	Administrasi Umum																																		
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.657.850	50,00%	9.878.900	87,30%	5.657.850	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	11.315.700	31.315.570	19.999.870					
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.587.310	100,00%	14.205.500	57,78%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.300.000	5,29%	0	0,00%	0	0,00%	100%	50%	100%	60%	100%	66%	100%	66%	24.587.310	45.577.444	20.990.134					
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			32.619.840	100,00%	1.248.600	3,83%	0	0,00%	1.520.400	4,66%	0	0,00%	3.984.500	12,21%	0	0,00%	0	0,00%	100%	4%	100%	10%	100%	24%	100%	24%	32.619.840	32.619.840	0					
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			450.580.000	41,67%	464.142.686	42,92%	630.810.000	58,33%	435.218.604	40,25%	0	0,00%	136.434.404	12,62%	0	0,00%	0	0,00%	42%	40%	100%	87%	100%	96%	100%	96%	1.081.390.000	1.471.375.000	389.985.000					
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																		
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			184.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	86.325.000	46,92%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	80%	100%	80%	184.000.000	301.231.280	117.231.280					
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			632.326.400	100,00%	27.186.675	4,30%	0	0,00%	12.000.000	1,90%	0	0,00%	277.650.000	43,91%	0	0,00%	0	0,00%	100%	5%	100%	6%	100%	55%	100%	55%	632.326.400	1.472.428.939	840.102.539					
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																		
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.398.000	100,00%	500.000	20,85%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	600.000	25,02%	0	0,00%	0	0,00%	100%	20%	100%	20%	100%	50%	100%	50%	2.398.000	4.390.000	1.992.000					
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			67.798.600	30,00%	68.101.077	30,13%	67.798.000	30,00%	41.490.723	18,36%	60.000.000	26,55%	54.127.643	23,95%	30.398.300	13,45%	0	0,00%	30%	30%	60%	50%	87%	75%	100%	75%	225.994.900	264.834.200	38.839.300					
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			109.887.100	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.528.000	5,94%	0	0,00%	7.758.000	7,06%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	32%	100%	64%	100%	64%	109.887.100	27.185.670	(82.701.430)					
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			189.500.000	100,00%	28.800.000	15,20%	0	0,00%	50.575.000	26,69%	0	0,00%	50.495.000	26,65%	0	0,00%	0	0,00%	100%	15%	100%	44%	100%	75%	100%	75%	189.500.000	199.235.000	9.735.000					
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																		

4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			113.760.000	40,00%	30.580.750	10,75%	71.100.000	25,00%	72.768.000	25,58%	71.100.000	25,00%	44.969.800	15,81%	28.440.000	10,00%		0	0,00%	40%	10%	65%	47%	90%	75%	100%	75%		284.400.000	467.292.400	182.892.400	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.020.000	40,00%	5.243.500	5,67%	23.137.500	25,00%	28.482.650	30,76%	23.137.500	25,00%	1.670.501	1,80%	9.255.000	10,00%		0	0,00%	40%	6%	65%	50%	90%	75%	100%	75%		92.550.000	91.400.000	(1.150.000)	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.512.240	40,00%	0	0,00%	19.070.150	25,00%	0	0,00%	19.070.150	25,00%	34.200.000	44,83%	7.628.060	10,00%		0	0,00%	40%	0%	65%	0%	90%	50%	100%	50%		76.280.600	37.730.000	(38.550.600)	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.962.200	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.504.000	36,61%	0	0,00%		0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	50%	100%	50%		25.962.200	34.282.200	8.320.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			181.785.000	100,00%	750.000	0,41%	0	0,00%	1.974.000	1,09%	0	0,00%	152.220.000	83,74%	0	0,00%		0	0,00%	100%	1%	100%	30%	100%	86%	100%	86%		181.785.000	261.785.000	80.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																																
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			8.595.117.407	33,33%	7.437.915.374	28,85%	8.549.574.357	33,16%	3.761.509.303	14,59%	8.640.660.456	33,51%	5.566.084.458	21,59%	0	0,00%		0	0,00%	33%	25%	66%	50%	100%	75%	100%	75%		25.785.352.220	24.725.661.770	(1.059.690.450)	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD			0	0,00%	0	0,00%	498.520.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		498.520.000	511.720.000	13.200.000	
4.02.01.2.15.03	Peleaksanaan Medical Check Up DPRD			0	0,00%	0	0,00%	70.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	45.538.200	65,05%	0	0,00%		0	0,00%	0%	0%	100%	0%	100%	91%	100%	91%		70.000.000	70.000.000	0	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD																																
4.02.01.2.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD			14.833.090	50,00%	0	0,00%	9.888.000	33,33%	2.898.000	9,77%	4.943.480	16,66%	1.990.000	6,71%	0	0,00%		0	0,00%	50%	0%	83%	27%	100%	36%	100%	36%		29.664.570	29.664.570	0	
4.02.01.2.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			467.475.760	100,00%	27.832.500	5,95%	0	0,00%	121.540.000	26,00%	0	0,00%	211.396.700	45,22%	0	0,00%		0	0,00%	100%	6%	100%	54%	100%	78%	100%	78%		467.475.760	664.275.600	196.799.840	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																																
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																																
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			967.694.550	100,00%	3.914.800	0,40%	0	0,00%	63.544.093	6,57%	0	0,00%	177.964.900	18,39%	0	0,00%		0	0,00%	100%	25%	100%	25%	100%	75%	100%	75%		967.694.550	967.694.550	0	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			6.722.659.380	100,00%	109.554.600	1,63%	0	0,00%	454.248.197	6,76%	0	0,00%	404.832.100	6,02%	0	0,00%		0	0,00%	100%	0%	100%	19%	100%	52%	100%	52%		6.722.659.380	6.732.659.090	9.999.710	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Penulisan-Undangan Fasilitas Penyusunan			21.099.850	100,00%	3.368.100	15,96%	0	0,00%	10.102.550	47,88%	0	0,00%	4.627.500	21,93%	0	0,00%		0	0,00%	100%	15%	100%	79%	100%	95%	100%	95%		21.099.850	21.099.850	0	
4.02.02.2.01.04	Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			938.835.460	100,00%	5.221.100	0,56%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	148.775.000	15,85%	0	0,00%		0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	80%	100%	80%		938.835.460	777.384.261	(161.451.199)	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran																																
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS			8.025.400	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.391.100	42,25%	0	0,00%		0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	66%	100%	66%		8.025.400	8.025.400	0	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.041.750	50,00%	1.659.000	27,27%	3.041.750	50,00%		0	0,00%	0%	0%	0%	0%	50%	30%	100%	30%		6.083.500	6.083.500	0	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.115.300	16,34%	6.825.200	100,00%		0	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	100%	70%		6.825.200	6.825.200	0	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan			0	0,00%	0	0,00%	3.101.800	50,00%	0	0,00%	3.101.800	50,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%		50%		100%		100%			6.203.600	6.203.600	0	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester			0	0,00%	0	0,00%	929.050	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	929.050	50,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	100%		1.858.100	1.858.100	0	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			0	0,00%	0	0,00%	4.808.450	50,00%	0	0,00%	4.808.450	50,00%	1.362.000	14,16%	0	0,00%		0	0,00%	0%	0%	50%	0%	100%	75%	100%	75%		9.616.900	9.616.900	0	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																																
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			45.137.700	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	100%		100%		100%		100%			45.137.700	45.137.700	0	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			22.586.400	50,00%	0	0,00%	22.586.400	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	50%		100%		100%		100%			45.172.800	45.172.800	0	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			0	0,00%	0	0,00%	22.351.450	50,00%	0	0,00%	22.351.450	50,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%		50%		100%		100%			44.702.900	44.702.900	0	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	44.702.900	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%		0%		100%		100%			44.702.900	44.702.900	0	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	44.702.900	100,00%		0	0,00%	0%		0%		0%		100%			44.702.900	44.702.900	0	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			0	0,00%	0	0,00%	3.160.400	100,00%	3.160.000	99,99%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		3.160.400	3.160.400	0	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Pengawasan Anggaran			1.377.500	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		1.377.500	1.377.500	0	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD																																
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD			458.572.590	25,00%	48.546.300	2,65%	458.572.590	25,00%	0	0,00%	917.145.180	50,00%	15.000.000	0,82%	0	0,00%		0	0,00%	25%	3%	50%	3%	100%	25%	100%	25%		1.834.290.360	1.834.290.360	0	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			161.596.116	40,00%	19.832.000	4,91%	161.596.116	40,00%	38.569.000	9,55%	80.798.058	20,00%	80.428.500	19,91%	0	0,00%		0	0,00%	40%	5%	80%	21%	100%	75%	100%	75%		403.990.290	567.723.500	163.733.210	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			124.062.375	25,00%	0	0,00%	124.062.375	25,00%	0	0,00%	124.062.375	25,00%	133.779.300	26,96%	124.062.375	25,00%		0	0,00%	25%	0%	50%	0%	75%	75%	100%	75%		496.249.500	496.249.500	0	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			119.858.068	40,00%	0	0,00%	104.870.184	35,00%	0	0,00%	59.927.534	20,00%	138.595.000	46,25%	14.981.884	5,00%		0	0,00%	40%	0%	75%	0%	95%	75%	100%	75%		299.637.670	299.637.670	0	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			67.185.756	40,00%	2.700.000	1,61%	67.185.756	40,00%	0	0,00%	33.592.878	20,00%	32.871.400	19,57%	0	0,00%		0	0,00%	40%	2%	80%	2%	100%	75%	100%	75%		167.964.390	167.964.390	0	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD			3.527.920	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		3.527.920	3.527.920	0	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																																
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			38.835.000	25,00%	90.000	0,06%	38.835.000	25,00%	0	0,00%	38.835.000	25,00%	500.000	0,32%	38.835.000	25,00%		0	0,00%	25%	1%	50%	1%	75%	2%	100%	2%		155.340.000	155.340.000	0	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			0	0,00%	995.100	15,17%	6.558.700	100,00%	5.000.000	76,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0%	15%	100%	91%	100%	100%	100%		6.558.700	6.558.700	0		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			40.759.920	2,51%	149.985.500	9,25%	500.000.000	30,82%	19.306.800	1,19%	540.758.300	33,33%	187.040.200	11,53%	540.759.240	33,33%		0	0,00%	3%</												

[illegible]

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN I
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program /Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540,00	16.070.540,00	100,00%	16.070.540,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800,00	12.116.800,00	100,00%	12.116.800,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850,00	39.399.850,00	100,00%	39.399.850,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110,00	15.893.110,00	100,00%	15.893.110,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660,00	10.842.660,00	100,00%	10.842.660,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740,00	17.810.740,00	50,53%	9.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.494.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156,00	5.133.989.156,00	35,71%	1.833.567.556,00	25,00%	1,85%	1.097.190.260,00	21,37%		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	701.734.574,00	25,00%	175.433.644,00	25,00%	0,25%	151.200.000,00	21,55%		
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040,00	19.612.040,00	100,00%	19.612.040,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190,00	26.140.190,00	100,00%	26.140.190,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600,00	5.922.600,00	100,00%	5.922.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900,00	3.890.900,00	100,00%	3.890.900,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300,00	2.803.300,00	100,00%	2.803.300,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600,00	2.401.600,00	100,00%	2.401.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	29.376.000,00	100,00%	29.376.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	152.000.000,00	25,00%	38.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.315.700,00	31.315.570,00	18,07%	5.657.850,00	90,00%	0,04%	9.878.900,00	31,55%		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.587.310,00	45.577.444,00	53,95%	24.587.310,00	50,00%	0,03%	14.205.500,00	31,17%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.840,00	32.619.840,00	100,00%	32.619.840,00	4,00%	0,00%	1.248.600,00	3,83%		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.081.390.000,00	1.471.375.000,00	30,62%	450.580.000,00	40,00%	0,85%	464.142.686,00	31,54%		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	184.000.000,00	301.231.280,00	61,08%	184.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	632.326.400,00	1.472.428.939,00	42,94%	632.326.400,00	5,00%	0,11%	27.186.675,00	1,85%		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.398.000,00	4.390.000,00	54,62%	2.398.000,00	20,00%	0,00%	500.000,00	11,39%		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.994.900,00	264.834.200,00	25,60%	67.798.600,00	30,00%	0,11%	68.101.077,00	25,71%		
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.887.100,00	27.185.670,00	100,00%	27.185.670,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.500.000,00	199.235.000,00	95,11%	189.500.000,00	15,00%	0,04%	28.800.000,00	14,46%		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.400.000,00	467.292.400,00	24,34%	113.760.000,00	10,00%	0,07%	30.580.750,00	6,54%		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.550.000,00	91.400.000,00	40,50%	37.020.000,00	6,00%	0,01%	5.243.500,00	5,74%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.280.600,00	37.730.000,00	80,87%	30.512.240,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.962.200,00	34.282.200,00	75,73%	25.962.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.785.000,00	261.785.000,00	69,44%	181.785.000,00	1,00%	0,00%	750.000,00	0,29%		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.785.352.220,00	24.725.661.770,00	34,76%	8.595.117.407,00	25,00%	8,93%	7.437.915.374,00	30,08%		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	498.520.000,00	511.720.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	29.664.570,00	50,00%	14.833.090,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	467.475.760,00	664.275.600,00	70,37%	467.475.760,00	6,00%	0,06%	27.832.500,00	4,19%		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	967.694.550,00	100,00%	967.694.550,00	25,00%	0,35%	3.914.800,00	0,40%		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.722.659.380,00	6.732.659.090,00	99,85%	6.722.659.380,00	0,00%	0,00%	109.554.600,00	1,63%		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	21.099.850,00	100,00%	21.099.850,00	15,00%	0,00%	3.368.100,00	15,96%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	938.835.460,00	777.384.261,00	100,00%	777.384.261,00	0,00%	0,00%	5.221.100,00	0,67%		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	8.025.400,00	100,00%	8.025.400,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.083.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.825.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.203.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.858.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.616.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	45.137.700,00	100,00%	45.137.700,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	45.172.800,00	50,00%	22.586.400,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	44.702.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	44.702.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	44.702.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	1.377.500,00	100,00%	1.377.500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00	1.834.290.360,00	25,00%	458.572.590,00	3,00%	0,08%	48.546.300,00	2,65%		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	403.990.290,00	567.723.500,00	28,46%	161.596.116,00	5,00%	0,04%	19.832.000,00	3,49%		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	496.249.500,00	25,00%	124.062.375,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	299.637.670,00	40,00%	119.858.068,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00	167.964.390,00	40,00%	67.185.756,00	2,00%	0,00%	2.700.000,00	1,61%		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Proqram Kerja DPRD	3.527.920,00	3.527.920,00	100,00%	3.527.920,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	155.340.000,00	25,00%	38.835.000,00	1,00%	0,00%	90.000,00	0,06%		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.558.700,00	0,00%	0,00	15,00%	0,00%	995.100,00	15,17%		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.622.277.460,00	1.411.121.310,00	2,89%	40.759.920,00	33,00%	0,67%	149.985.500,00	10,63%		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	960.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah										
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	306.669.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00	142.397.720,00	40,00%	56.958.220,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00	18.460.820.400,00	25,00%	4.615.205.100,00	10,00%	2,67%	1.808.484.243,00	9,80%		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
		69.023.411.970	69.248.368.264	39,82%	27.576.116.263		16,18%	11.517.467.565	16,63%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN II
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540,00	16.070.540,00	100,00%	16.070.540,00	59,11%	0,01%	3.401.000,00	21,16%		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800,00	12.116.800,00	100,00%	12.116.800,00	35,08%	0,01%	1.603.000,00	13,23%		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850,00	39.399.850,00	100,00%	39.399.850,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110,00	15.893.110,00	100,00%	15.893.110,00	50,00%	0,01%	3.885.000,00	24,44%		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660,00	10.842.660,00	100,00%	10.842.660,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740,00	17.810.740,00	100,00%	17.810.740,00	50,00%	0,01%	2.764.300,00	15,52%		
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.494.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156,00	5.133.989.156,00	66,97%	3.438.006.678,00	50,00%	3,71%	1.985.562.375,00	38,67%		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	701.734.574,00	50,00%	350.867.288,00	50,00%	0,51%	306.000.000,00	43,61%		
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040,00	19.612.040,00	100,00%	19.612.040,00	50,00%	0,01%	4.430.300,00	22,59%		
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190,00	26.140.190,00	100,00%	26.140.190,00	50,00%	0,02%	2.186.450,00	8,36%		
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600,00	5.922.600,00	100,00%	5.922.600,00	50,00%	0,00%	454.600,00	7,68%		
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900,00	3.890.900,00	100,00%	3.890.900,00	50,00%	0,00%	288.000,00	7,40%		
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300,00	2.803.300,00	100,00%	2.803.300,00	50,00%	0,00%	159.250,00	5,68%		
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600,00	2.401.600,00	100,00%	2.401.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	29.376.000,00	100,00%	29.376.000,00	100,00%	0,04%	28.900.000,00	98,38%		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	152.000.000,00	50,00%	76.000.000,00	25,00%	0,05%	25.000.000,00	16,45%		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.315.700,00	31.315.570,00	36,13%	11.315.700,00	90,00%	0,04%	9.878.900,00	31,55%		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.587.310,00	45.577.444,00	53,95%	24.587.310,00	60,00%	0,04%	14.205.500,00	31,17%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.840,00	32.619.840,00	100,00%	32.619.840,00	10,00%	0,00%	2.769.000,00	8,49%		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.081.390.000,00	1.471.375.000,00	73,50%	1.081.390.000,00	87,35%	1,86%	899.361.290,00	61,12%		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	184.000.000,00	301.231.280,00	61,08%	184.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	632.326.400,00	1.472.428.939,00	42,94%	632.326.400,00	6,20%	0,13%	39.186.675,00	2,66%		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.398.000,00	4.390.000,00	54,62%	2.398.000,00	20,00%	0,00%	500.000,00	11,39%		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.994.900,00	264.834.200,00	51,20%	135.596.600,00	50,00%	0,19%	109.591.800,00	41,38%		
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.887.100,00	27.185.670,00	100,00%	27.185.670,00	32,00%	0,01%	6.528.000,00	24,01%		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.500.000,00	199.235.000,00	95,11%	189.500.000,00	44,00%	0,13%	79.375.000,00	39,84%		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.400.000,00	467.292.400,00	39,56%	184.860.000,00	47,00%	0,32%	103.348.750,00	22,12%		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.550.000,00	91.400.000,00	65,82%	60.157.500,00	50,00%	0,07%	33.726.150,00	36,90%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.280.600,00	37.730.000,00	100,00%	37.730.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.962.200,00	34.282.200,00	75,73%	25.962.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.785.000,00	261.785.000,00	69,44%	181.785.000,00	30,00%	0,11%	2.724.000,00	1,04%		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.785.352.220,00	24.725.661.770,00	69,34%	17.144.691.764,00	50,00%	17,85%	11.199.424.677,00	45,29%		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	498.520.000,00	511.720.000,00	97,42%	498.520.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	29.664.570,00	83,34%	24.721.090,00	27,00%	0,01%	2.898.000,00	9,77%		
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	467.475.760,00	664.275.600,00	70,37%	467.475.760,00	54,00%	0,52%	149.372.500,00	22,49%		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	967.694.550,00	100,00%	967.694.550,00	25,00%	0,35%	67.458.893,00	6,97%		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.722.659.380,00	6.732.659.090,00	99,85%	6.722.659.380,00	18,75%	1,82%	563.802.797,00	8,37%		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	21.099.850,00	100,00%	21.099.850,00	78,95%	0,02%	13.470.650,00	63,84%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	938.835.460,00	777.384.261,00	100,00%	777.384.261,00	0,00%	0,00%	5.221.100,00	0,67%		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	8.025.400,00	100,00%	8.025.400,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.083.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.825.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.203.600,00	50,00%	3.101.800,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.858.100,00	50,00%	929.050,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.616.900,00	50,00%	4.808.450,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	45.137.700,00	100,00%	45.137.700,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	45.172.800,00	100,00%	45.172.800,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	44.702.900,00	50,00%	22.351.450,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	44.702.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	44.702.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.400,00	100,00%	3.160.400,00	100,00%	0,00%	3.160.000,00	99,99%		
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	1.377.500,00	100,00%	1.377.500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00	1.834.290.360,00	50,00%	917.145.180,00	3,00%	0,08%	48.546.300,00	2,65%		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	403.990.290,00	567.723.500,00	56,93%	323.192.232,00	21,00%	0,17%	58.401.000,00	10,29%		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	496.249.500,00	50,00%	248.124.750,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	299.637.670,00	75,00%	224.728.252,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00	167.964.390,00	80,00%	134.371.512,00	2,00%	0,00%	2.700.000,00	1,61%		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00	3.527.920,00	100,00%	3.527.920,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	155.340.000,00	50,00%	77.670.000,00	1,00%	0,00%	90.000,00	0,06%		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.558.700,00	100,00%	6.558.700,00	91,00%	0,01%	5.995.100,00	91,41%		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.622.277.460,00	1.411.121.310,00	38,32%	540.759.920,00	33,00%	0,67%	169.292.300,00	12,00%		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	960.700,00	100,00%	960.700,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah										
4.02.02.2.07.01	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	306.669.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00	142.397.720,00	80,00%	113.918.220,00	30,00%	0,06%	6.400.000,00	4,49%		
4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00	18.460.820.400,00	50,00%	9.230.410.200,00	50,00%	13,33%	4.145.065.787,00	22,45%		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
		69.023.411.970	69.248.368.264	65,75%	45.528.247.307		42,21%	20.107.128.444	29,04%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN III
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540,00	16.070.540,00	100,00%	16.070.540,00	66,67%	0,02%	8.375.400,00	52,12%		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800,00	12.116.800,00	100,00%	12.116.800,00	38,75%	0,01%	2.650.900,00	21,88%		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850,00	39.399.850,00	100,00%	39.399.850,00	18,60%	0,01%	6.221.200,00	15,79%		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110,00	15.893.110,00	100,00%	15.893.110,00	50,00%	0,01%	3.885.000,00	24,44%		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660,00	10.842.660,00	100,00%	10.842.660,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740,00	17.810.740,00	100,00%	17.810.740,00	75,00%	0,02%	5.687.500,00	31,93%		
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.494.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Target indikator kegiatan sama dengan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	sub kegiatan di nihilkan di APBD-Perubahan 2021
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156,00	5.133.989.156,00	94,06%	4.828.777.178,00	75,00%	5,56%	2.896.660.682,00	56,42%		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	701.734.574,00	75,00%	526.300.932,00	75,00%	0,76%	464.824.620,00	66,24%		
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040,00	19.612.040,00	100,00%	19.612.040,00	75,00%	0,02%	13.199.100,00	67,30%		
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190,00	26.140.190,00	100,00%	26.140.190,00	75,00%	0,03%	2.186.450,00	8,36%		
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600,00	5.922.600,00	100,00%	5.922.600,00	75,00%	0,01%	454.600,00	7,68%		
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900,00	3.890.900,00	100,00%	3.890.900,00	50,00%	0,00%	288.000,00	7,40%		
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300,00	2.803.300,00	100,00%	2.803.300,00	50,00%	0,00%	159.250,00	5,68%		
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600,00	2.401.600,00	100,00%	2.401.600,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	29.376.000,00	100,00%	29.376.000,00	100,00%	0,04%	28.900.000,00	98,38%		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	152.000.000,00	100,00%	152.000.000,00	25,00%	0,05%	27.815.000,00	18,30%		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.315.700,00	31.315.570,00	36,13%	11.315.700,00	90,00%	0,04%	9.878.900,00	31,55%	Kebutuhan komponen instalasi listrik kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.587.310,00	45.577.444,00	53,95%	24.587.310,00	66,00%	0,04%	15.505.500,00	34,02%	kebutuhan alat dan bahan pembersih masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.619.840,00	32.619.840,00	100,00%	32.619.840,00	24,00%	0,01%	6.753.500,00	20,70%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.081.390.000,00	1.471.375.000,00	73,50%	1.081.390.000,00	95,78%	2,04%	1.035.795.694,00	70,40%	kebutuhan makan minum rapat dan biaya koordinasi masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	184.000.000,00	301.231.280,00	61,08%	184.000.000,00	80,00%	0,35%	86.325.000,00	28,66%	kebutuhan mebel di Komisi, Fraksi dan ruang rapat paripurna diperbarui agar lebih representatif	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	632.326.400,00	1.472.428.939,00	42,94%	632.326.400,00	55,00%	1,17%	316.836.675,00	21,52%	kebutuhan sarana dan prasarana di Komisi, Fraksi dan ruang rapat paripurna diperbarui agar lebih representatif	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.398.000,00	4.390.000,00	54,62%	2.398.000,00	50,00%	0,00%	1.100.000,00	25,06%	kebutuhan surat berharga (materai) masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.994.900,00	264.834.200,00	73,86%	195.596.600,00	75,00%	0,29%	163.719.443,00	61,82%	Biaya listrik Kantor masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.887.100,00	27.185.670,00	100,00%	27.185.670,00	63,64%	0,02%	14.286.000,00	52,55%	Belanja jasa langganan internet tidak bisa digunakan karena sdh diakomodir oleh Diskominfo	diusulkan pengurangan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.500.000,00	199.235.000,00	95,11%	189.500.000,00	75,00%	0,22%	129.870.000,00	65,18%		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.400.000,00	467.292.400,00	54,78%	255.960.000,00	75,00%	0,51%	148.318.550,00	31,74%	kebutuhan Belanja Bahan bakar dan pelumas mobil Jabatan masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.550.000,00	91.400.000,00	91,13%	83.295.000,00	75,00%	0,10%	35.396.651,00	38,73%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.280.600,00	37.730.000,00	100,00%	37.730.000,00	50,00%	0,03%	34.200.000,00	90,64%		
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.962.200,00	34.282.200,00	75,73%	25.962.200,00	50,00%	0,02%	9.504.000,00	27,72%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.785.000,00	261.785.000,00	69,44%	181.785.000,00	86,00%	0,33%	154.944.000,00	59,19%		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.785.352.220,00	24.725.661.770,00	100,00%	24.725.661.770,00	75,00%	26,78%	16.765.509.135,00	67,81%	Anggaran pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD kelebihan	diusulkan pengurangan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	498.520.000,00	511.720.000,00	97,42%	498.520.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Kebutuhan baju adat Sekwan dan PAW belum terpenuhi	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	91,43%	0,09%	45.538.200,00	65,05%		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	29.664.570,00	100,00%	29.664.570,00	36,12%	0,02%	4.888.000,00	16,48%		
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	467.475.760,00	664.275.600,00	70,37%	467.475.760,00	78,00%	0,75%	360.769.200,00	54,31%	Kebutuhan makan minum rapat dan Makan minum Tamu Dewan masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	967.694.550,00	100,00%	967.694.550,00	75,00%	1,05%	245.423.793,00	25,36%		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.722.659.380,00	6.732.659.090,00	99,85%	6.722.659.380,00	52,00%	5,06%	968.634.897,00	14,39%	Honorarium narasumber Rancangan peraturan masih kurang	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	21.099.850,00	100,00%	21.099.850,00	95,00%	0,03%	18.098.150,00	85,77%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	938.835.460,00	777.384.261,00	100,00%	777.384.261,00	79,80%	0,90%	153.996.100,00	19,81%	Biaya penunjang penyusunan/keterangan/naskah akademik berlebih	diusulkan pengurangan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	8.025.400,00	100,00%	8.025.400,00	66,33%	0,01%	3.391.100,00	42,25%		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.083.500,00	50,00%	3.041.750,00	30,00%	0,00%	1.659.000,00	27,27%		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.825.200,00	0,00%	0,00	70,00%	0,01%	1.115.300,00	16,34%		
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.203.600,00	100,00%	6.203.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.858.100,00	50,00%	929.050,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.616.900,00	100,00%	9.616.900,00	75,00%	0,01%	1.362.000,00	14,16%		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	45.137.700,00	100,00%	45.137.700,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	45.172.800,00	100,00%	45.172.800,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	44.702.900,00	100,00%	44.702.900,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	44.702.900,00	100,00%	44.702.900,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	44.702.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.400,00	100,00%	3.160.400,00	100,00%	0,00%	3.160.000,00	99,99%		
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	1.377.500,00	100,00%	1.377.500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00	1.834.290.360,00	100,00%	1.834.290.360,00	25,00%	0,66%	63.546.300,00	3,46%		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	403.990.290,00	567.723.500,00	71,16%	403.990.290,00	75,00%	0,61%	138.829.500,00	24,45%	Diperlukannya Peralatan dan pendukung dokumentasi Dewan	diusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan TA. 2021
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	496.249.500,00	75,00%	372.187.125,00	75,00%	0,54%	133.779.300,00	26,96%		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	299.637.670,00	95,00%	284.655.786,00	75,00%	0,32%	138.595.000,00	46,25%		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00	167.964.390,00	100,00%	167.964.390,00	75,00%	0,18%	35.571.400,00	21,18%		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00	3.527.920,00	100,00%	3.527.920,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	155.340.000,00	75,00%	116.505.000,00	2,00%	0,00%	590.000,00	0,38%		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.558.700,00	100,00%	6.558.700,00	100,00%	0,01%	5.995.100,00	91,41%		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.622.277.460,00	1.411.121.310,00	76,64%	1.081.518.220,00	66,67%	1,36%	356.332.500,00	25,25%		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	960.700,00	100,00%	960.700,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah										
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	306.669.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	fasilitasi pengharmonisasian Raperda berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 tidak terlaksana	sub kegiatan di nihilkan di APBD-Perubahan 2021
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00	142.397.720,00	100,00%	142.397.720,00	75,00%	0,15%	25.137.000,00	17,65%		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00	18.460.820.400,00	75,00%	13.845.615.300,00	70,00%	18,66%	5.435.918.568,00	29,45%		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00%	1.360.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
		69.023.411.970	69.248.368.264	88,71%	61.428.772.712		68,91%	30.531.581.158	44,09%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.070.540,00	16.070.540,00	100,00%	16.070.540,00	100,00%	0,02%	8.525.400,00	53,05%		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.116.800,00	12.116.800,00	100,00%	12.116.800,00	100,00%	0,02%	4.390.900,00	36,24%		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.399.850,00	39.399.850,00	100,00%	39.399.850,00	100,00%	0,06%	13.867.400,00	35,20%		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.893.110,00	15.893.110,00	100,00%	15.893.110,00	100,00%	0,02%	8.475.600,00	53,33%		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.842.660,00	10.842.660,00	100,00%	10.842.660,00	100,00%	0,02%	2.548.500,00	23,50%		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.810.740,00	17.810.740,00	100,00%	17.810.740,00	100,00%	0,03%	8.449.500,00	47,44%		
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.494.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.989.156,00	5.133.989.156,00	100,00%	5.133.989.156,00	100,00%	7,41%	4.014.242.350,00	78,19%		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	701.734.574,00	701.734.574,00	100,00%	701.734.574,00	100,00%	1,01%	619.970.160,00	88,35%		
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.612.040,00	19.612.040,00	100,00%	19.612.040,00	100,00%	0,03%	17.366.600,00	88,55%		
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.140.190,00	26.140.190,00	100,00%	26.140.190,00	100,00%	0,04%	11.270.530,00	43,12%		
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.922.600,00	5.922.600,00	100,00%	5.922.600,00	100,00%	0,01%	2.379.600,00	40,18%		
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.890.900,00	3.890.900,00	100,00%	3.890.900,00	100,00%	0,01%	1.273.000,00	32,72%		
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.803.300,00	2.803.300,00	100,00%	2.803.300,00	100,00%	0,00%	1.233.850,00	44,01%		
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.401.600,00	2.401.600,00	100,00%	2.401.600,00	100,00%	0,00%	1.319.200,00	54,93%		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.376.000,00	29.376.000,00	100,00%	29.376.000,00	100,00%	0,04%	28.900.000,00	98,38%		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	152.000.000,00	100,00%	152.000.000,00	70,00%	0,15%	83.599.377,00	55,00%		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.315.700,00	31.315.570,00	100,00%	31.315.570,00	100,00%	0,05%	29.535.600,00	94,32%		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.587.310,00	45.577.444,00	100,00%	45.577.444,00	100,00%	0,07%	41.657.300,00	91,40%		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.619.840,00	32.619.840,00	100,00%	32.619.840,00	95,00%	0,04%	20.373.400,00	62,46%		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.081.390.000,00	1.471.375.000,00	100,00%	1.471.375.000,00	98,00%	2,08%	1.397.261.446,00	94,96%		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	184.000.000,00	301.231.280,00	100,00%	301.231.280,00	100,00%	0,44%	216.785.000,00	71,97%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	632.326.400,00	1.472.428.939,00	100,00%	1.472.428.939,00	95,00%	2,02%	1.036.269.525,00	70,38%		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.398.000,00	4.390.000,00	100,00%	4.390.000,00	100,00%	0,01%	4.390.000,00	100,00%		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.994.900,00	264.834.200,00	100,00%	264.834.200,00	100,00%	0,38%	230.332.854,00	86,97%		
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.887.100,00	27.185.670,00	100,00%	27.185.670,00	98,33%	0,04%	21.411.500,00	78,76%		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.500.000,00	199.235.000,00	100,00%	199.235.000,00	98,00%	0,28%	180.880.000,00	90,79%		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.400.000,00	467.292.400,00	100,00%	467.292.400,00	100,00%	0,67%	217.844.350,00	46,62%		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.550.000,00	91.400.000,00	100,00%	91.400.000,00	87,50%	0,12%	49.576.051,00	54,24%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.280.600,00	37.730.000,00	100,00%	37.730.000,00	100,00%	0,05%	35.786.500,00	94,85%		
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.962.200,00	34.282.200,00	100,00%	34.282.200,00	50,00%	0,02%	9.504.000,00	27,72%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.785.000,00	261.785.000,00	100,00%	261.785.000,00	90,00%	0,34%	215.274.000,00	82,23%		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.785.352.220,00	24.725.661.770,00	100,00%	24.725.661.770,00	100,00%	35,71%	22.538.049.903,00	91,15%		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	498.520.000,00	511.720.000,00	100,00%	511.720.000,00	100,00%	0,74%	388.438.000,00	75,91%		
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	0,10%	45.538.200,00	65,05%		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	29.664.570,00	29.664.570,00	100,00%	29.664.570,00	80,00%	0,03%	8.018.000,00	27,03%		
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	467.475.760,00	664.275.600,00	100,00%	664.275.600,00	100,00%	0,96%	608.713.200,00	91,64%		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	967.694.550,00	967.694.550,00	100,00%	967.694.550,00	80,00%	1,12%	463.233.593,00	47,87%		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.722.659.380,00	6.732.659.090,00	100,00%	6.732.659.090,00	80,00%	7,78%	1.882.728.913,00	27,96%		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	21.099.850,00	21.099.850,00	100,00%	21.099.850,00	100,00%	0,03%	18.848.150,00	89,33%		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	938.835.460,00	777.384.261,00	100,00%	777.384.261,00	100,00%	1,12%	252.329.100,00	32,46%		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	8.025.400,00	8.025.400,00	100,00%	8.025.400,00	100,00%	0,01%	7.969.200,00	99,30%		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.083.500,00	6.083.500,00	100,00%	6.083.500,00	100,00%	0,01%	6.061.800,00	99,64%		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	6.825.200,00	6.825.200,00	100,00%	6.825.200,00	100,00%	0,01%	6.114.400,00	89,59%		
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	6.203.600,00	6.203.600,00	100,00%	6.203.600,00	100,00%	0,01%	6.091.800,00	98,20%		
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	1.858.100,00	1.858.100,00	100,00%	1.858.100,00	100,00%	0,00%	1.804.200,00	97,10%		
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.616.900,00	9.616.900,00	100,00%	9.616.900,00	100,00%	0,01%	9.061.000,00	94,22%		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	45.137.700,00	45.137.700,00	100,00%	45.137.700,00	66,70%	0,04%	2.942.300,00	6,52%		
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45.172.800,00	45.172.800,00	100,00%	45.172.800,00	66,67%	0,04%	2.934.000,00	6,50%		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.702.900,00	44.702.900,00	100,00%	44.702.900,00	66,67%	0,04%	2.479.900,00	5,55%		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	44.702.900,00	44.702.900,00	100,00%	44.702.900,00	66,67%	0,04%	2.320.200,00	5,19%		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	44.702.900,00	44.702.900,00	100,00%	44.702.900,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.160.400,00	3.160.400,00	100,00%	3.160.400,00	100,00%	0,00%	3.160.000,00	99,99%		
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.377.500,00	1.377.500,00	100,00%	1.377.500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.834.290.360,00	1.834.290.360,00	100,00%	1.834.290.360,00	71,50%	1,89%	480.162.487,00	26,18%		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	403.990.290,00	567.723.500,00	100,00%	567.723.500,00	90,00%	0,74%	452.780.500,00	79,75%		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	496.249.500,00	496.249.500,00	100,00%	496.249.500,00	80,00%	0,57%	252.174.300,00	50,82%		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.670,00	299.637.670,00	100,00%	299.637.670,00	80,00%	0,35%	219.670.755,00	73,31%		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.964.390,00	167.964.390,00	100,00%	167.964.390,00	100,00%	0,24%	152.721.400,00	90,92%		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.527.920,00	3.527.920,00	100,00%	3.527.920,00	100,00%	0,01%	500.000,00	14,17%		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	155.340.000,00	155.340.000,00	100,00%	155.340.000,00	5,00%	0,01%	3.515.000,00	2,26%		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.558.700,00	6.558.700,00	100,00%	6.558.700,00	100,00%	0,01%	6.505.100,00	99,18%		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.622.277.460,00	1.411.121.310,00	100,00%	1.411.121.310,00	100,00%	2,04%	634.113.100,00	44,94%		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	960.700,00	960.700,00	100,00%	960.700,00	100,00%	0,00%	426.000,00	44,34%		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah										
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	306.669.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	142.397.720,00	142.397.720,00	100,00%	142.397.720,00	90,00%	0,19%	85.187.000,00	59,82%		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.460.820.400,00	18.460.820.400,00	100,00%	18.460.820.400,00	80,00%	21,33%	8.094.772.256,00	43,85%		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00%	1.360.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%		
		69.023.411.970	69.248.368.264	100,00%	69.248.368.264		90,68%	45.174.057.250	65,23%		

MATRIK KESELARASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretarita DPR		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian.	Prosentasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan pelayanan dan pengeloan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani		2.977.636.084	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
										Administrasi Umum Perangkat Daerah					
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Melaksanakan fasilitasi pemeriksa kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya		70.000.000											
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD															
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD															
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD															
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/bimtek Sekretariat DPRD yang difalitasi		152.000.000						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
Peningkatan Kapasitas DPRD															
Bimbingan Teknis DPRD						Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difalitasi		1.834.290.360						
Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia															
Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan		496.249.500											
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Melaksanakan fasiltasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan		299.637.670					

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
								Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana		Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan		2.115.387.433	
					2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolannya	Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD. Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya		Peningkatan Kapasitas DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Melaksanakan penyebarluasan informasi/pemberitaan DPRD Melaksanakan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolannya	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah kegiatan keprotokolannya yang difasilitasi		567.723.500 167.964.390 142.397.720	
					3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD		94.322.960	

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan		29.879.262.966	
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan			
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
										Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
										Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					
										Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan		17.810.740	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan		41.158.590	
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD					
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
					4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi		Layanan Administrasi DPRD	Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat DPRD	Jumlah Rapat yang difasilitasi		693.940.170	
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Fasilitasi Fraksi DPRD					
										Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
										Peningkatan Kapasitas DPRD	Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan		18.460.820.400	
										Penyusunan Program Kerja DPRD					
										Fasilitasi Tugas DPRD					
										Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					
										Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					
								Persentasi Fasilitasi Pembahasan Rancangan Perda		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda	Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi		8.498.837.751	
										Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
										Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan					
										Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik					
										Pembahasan Kerja Sama Daerah					
										Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah					
										Pembahasan Kebijakan Anggaran		melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	38.612.700	
										Pembahasan KUA dan PPAS					
										Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
										Pembahasan APBD					
										Pembahasan APBD Perubahan					
										Pembahasan Laporan Semester					
										Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					
						Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi		229.917.800	
										Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum					
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					
										Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					
										Pengawasan Penggunaan Anggaran					
										Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
										Pengawasan Kode Etik DPRD					
										Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Melaksanakan fasilitasi hearing dan penyerapan aspirasi	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan		1.411.121.310	
										Pelaksanaan Reses					
										Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi		161.898.700	
										Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					
										Kunjungan Kerja dalam Daerah					



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21863

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : /SET.DPRD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan Bagian terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal Januari 2022

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : /SET.DPRD/2022

TANGGAL : JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Keuangan	Ketua
2.	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum dan Humas	Anggota
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Anggota

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

LUFFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Telp (0512) 21863

K E P U T U S A N SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah LAUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal Januari 2022.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,










LUFFIATI UYUN. M. Pd
NIP. 19620622 1987 2 002

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : Nomor Tahun 2022
 Tanggal : Januari 2022

A. INFORMASI PROSEDUR

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p>SEKRETARIAT DPRD</p>	Nomor SOP	
		Tgl pembuatan sebelum disahkan	
		Tgl ujicoba	
		Tgl Pengesahan	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dasar Hukum		Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;		<ol style="list-style-type: none">Tim Penyusunan Lakip terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf PendukungKualifikasi anggota tim pemyusunan Lakip adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi KomputerPeningkatan kompetensi tim penyusun LAKIPHasil penyusunan Lakip adalah berupa laporan Lakip SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD	
Identifikasi Risiko		Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">Keterbatasan pengetahuan tim penyusunPeraturan yang selalu berubah (dinamis)Tidak lengkapnya data yang diperlukan			

B.URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kabag Keuangan	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun SKPD Lakip					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Sekretaris					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip	
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Sekretris					Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun Lakip SKPD ditandatangani Sekretaris	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi					Jadwal/agenda kerja dan matrik (cheklitst)materi/bahan penyusuna Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip	
5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD					Data dan informasi (tupoksi,struktur tata laksana, kepegawaian).ren stra,IKU,RKT,RK A,Lakip thn sebelumnya dan info lainnya	7 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	



6	Analisis				Gambaran tupokasi,SDM,kin erja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis,visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,progra m/kegiatan/indika tor kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis, Teridentifikasi program/kegiatan yang beroreantasi hasil	
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD				Draf rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD				Naskah Rancangan Lakip SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan Lakip SKPD(visi misi ,keselerasantujuan,sasa ran,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD				Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Sekretris	
10	Penetapan Lakip SKPD				Lakip yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Sekretaris, dan dilakukan penggandaan dokumen oleh Sekretariat	